KADIN NEWS

Edisi: November 2026

KADIN INDONESIA



Anindya Bakrie Tetapkan Tiga Rekomendasi Rapimnas Kadin 2026

Dari Desa ke Pasar Dunia, UMKM Harus Naik Kelas

Kemitraan Publik-Swasta Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

Rupiah Bisa Tembus Rp 21.000 Jika Praktik Goreng Saham Tak Dihentikan

"Buy Indonesia" & "Buy from Indonesia", Pemulihan Kepercayaan Investor Menjadi Kunci

BERBASIS DESA, EKONOMI INDONESIA MENDUNIA



Anindya Novyan Bakrie

Indonesia mendunia ketika produk desanya menjangkau pasar global dan hasilnya kembali meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di desa, kekuatan ekonomi Indonesia berakar. Petani menghasilkan pangan, nelayan menyediakan sumber protein, peternak menjaga pasokan, dan perajin mengolah keterampilan menjadi produk bernilai. Di tangan mereka, sumber daya menjadi penghidupan. Ketika kegiatan itu terhubung dengan pembiayaan, teknologi, industri, dan pasar, desa dapat menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi nasional.

Inilah gagasan yang mendasari Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada 29–30 Oktober 2026 di Jakarta. Mengusung tema "Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia", Rapimnas menempatkan kemajuan usaha rakyat sebagai landasan penguatan daya saing Indonesia.

Dalam laporan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 31 Oktober 2026, Kadin merangkum 799 aspirasi dunia usaha. Masukan tersebut dihimpun melalui pertemuan respons strategis, rapat koordinasi nasional, rapat pimpinan provinsi, asosiasi dan himpunan usaha, serta survei Kadin Business Pulse.

Di balik ratusan aspirasi itu terdapat kebutuhan yang saling berkaitan: kepastian berusaha, kelancaran pembiayaan, ketersediaan bahan baku, dan akses pasar. Kebutuhan tersebut dirasakan perusahaan besar maupun usaha kecil, dengan tantangan yang berbeda sesuai sektor dan wilayahnya.

Bagi kami, ekonomi kerakyatan berarti memperbesar kemampuan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah dan memperoleh bagian yang adil dari pertumbuhan. Semangat Pasal 33 UUD 1945 perlu diterjemahkan melalui kemitraan yang membuat petani lebih produktif, koperasi lebih profesional, UMKM lebih kompetitif, serta industri nasional semakin kuat.

Berakar pada Produksi

Ketidakpastian global mempertegas kebutuhan untuk memperkuat kemampuan domestik. Ketegangan geopolitik, gangguan perdagangan, perubahan iklim, serta gejolak energi dan pasar keuangan dapat memengaruhi biaya produksi, distribusi, dan keputusan investasi.

Pangan, air, energi, dan pembiayaan merupakan unsur ketahanan yang saling terhubung. Gangguan air dapat menekan hasil pertanian dan pasokan listrik. Kenaikan harga energi memperbesar biaya angkutan serta produksi. Gejolak harga pangan mengurangi ruang belanja rumah tangga. Ketika pembiayaan tersendat, kegiatan usaha ikut terhambat.

Karena itu, pembangunan bendungan, penguatan produksi pangan, peningkatan pasokan energi domestik, dan pengembangan energi terbarukan perlu terhubung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur menghasilkan manfaat lebih besar ketika membuka kesempatan produksi dan memperluas pasar bagi usaha di sekitarnya.

Indonesia memiliki modal ketahanan yang kuat. Namun, kekuatan fundamental perlu diterjemahkan menjadi keyakinan pelaku usaha untuk berekspansi.

Survei Kadin Business Pulse kuartal III-2026 terhadap 330 anggota di 28 provinsi menunjukkan bahwa 40,6% responden menilai kondisi bisnis memburuk. Proporsinya menurun dari 47,1% pada kuartal sebelumnya. Meski tekanan mulai mereda, sebanyak 35,5% responden masih memilih menunggu. Sementara itu, responden yang berencana berinvestasi tercatat 32,4%, turun dari 47,1% pada kuartal IV-2025.

Survei tersebut menggambarkan pengalaman responden dan menjadi masukan bagi Kadin untuk membaca kebutuhan lapangan. Pesannya jelas: keberanian menanamkan modal membutuhkan kepastian kebijakan, pembiayaan yang tersedia, dan prospek permintaan yang meyakinkan.

Rapimnas karena itu merumuskan tiga agenda utama: memperkuat bantalan menghadapi guncangan ekonomi, memastikan bahan baku bagi produksi rakyat, dan menghadirkan kepastian berusaha agar produk Indonesia mampu mendunia. Arus kas perusahaan, daya beli rumah tangga, dan kelancaran produksi harus dijaga sebagai satu rangkaian.

Dari Desa Menuju Pasar Dunia

Untuk menghubungkan ketahanan domestik dengan peluang global, Kadin mengusulkan dua payung strategi: Buy Indonesia dan We Buy From Indonesia.

Buy Indonesia mengajak masyarakat dan investor menanamkan modal dalam pertumbuhan Indonesia, melalui investasi langsung maupun pasar modal. Modal tersebut perlu memperkuat kapasitas produksi, membangun industri di daerah, mempercepat adopsi teknologi, dan menciptakan pekerjaan berkualitas.

We Buy From Indonesia mendorong dunia memperbesar pembelian barang dan jasa Indonesia. Sawit beserta turunannya, energi, mineral, logam, furnitur, tekstil, garmen, karet, dan berbagai produk lainnya menyediakan pijakan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah.

Penghubung kedua strategi tersebut adalah usaha rakyat. Investasi membangun kemampuan produksi. Koperasi menghimpun pasokan masyarakat. Industri mengolah dan meningkatkan mutu. Jaringan perdagangan mempertemukan produk dengan pembeli. Pendapatan yang dihasilkan kemudian memperkuat modal dan kemampuan masyarakat untuk kembali berproduksi.

Alur dari desa menuju pabrik dan pasar dunia harus membentuk hubungan yang berkelanjutan. Petani membutuhkan kepastian penyerapan hasil. Industri membutuhkan pasokan yang konsisten. Pembeli membutuhkan mutu dan ketepatan pengiriman. Perbankan membutuhkan dasar usaha yang layak dibiayai.

Kadin ingin mempertemukan kebutuhan tersebut agar kemitraan menjadi hubungan bisnis yang produktif dan saling menguntungkan.

Koperasi sebagai Penghubung Produksi

Rekomendasi pertama Rapimnas adalah mendorong industrialisasi daerah dengan mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bagi UMKM sesuai keunggulan wilayah.

Koperasi dapat menghimpun hasil produksi, menyelaraskan mutu, membantu pengadaan sarana usaha, serta memperkuat pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Melalui pengelolaan yang profesional, koperasi memberi kesempatan kepada produsen kecil untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam skala yang lebih besar.

Di sentra pertanian, pengolahan dan pengemasan dapat memperpanjang daya simpan sekaligus meningkatkan nilai jual. Di wilayah perikanan, rantai dingin membantu menjaga mutu sampai ke konsumen. Di kawasan kerajinan, pendampingan desain dan pemasaran dapat membuka pasar baru.

Pengembangan tersebut harus dimulai dari potensi wilayah dan kebutuhan pembeli. Investasi pengolahan memerlukan kepastian bahan baku, tenaga kerja, energi, logistik, serta pasar. Kadin siap mempertemukan koperasi dan UMKM dengan perusahaan besar, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, dan pembeli.

Rekomendasi kedua adalah memperkuat kemandirian pangan melalui keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis. Kebutuhan program ini dapat menjadi sumber permintaan yang membantu petani, peternak, dan nelayan merencanakan produksi.

Pelaksanaannya membutuhkan pemetaan pemasok, standar keamanan pangan, kesinambungan pasokan, distribusi yang andal, dan pembayaran tepat waktu. Dengan pengelolaan tersebut, perbaikan gizi dapat berjalan bersama peningkatan pendapatan produsen lokal.

Rekomendasi ketiga adalah membangun ekosistem closed loop, yaitu keterhubungan antara pembiayaan, sarana produksi, pendampingan, dan penyerapan hasil usaha. KUR yang terhubung dengan pembeli memiliki dasar penjualan yang lebih jelas. Pendampingan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan kemampuan mengelola keuangan.

Kemitraan ini perlu dilengkapi kontrak yang transparan, standar mutu yang dipahami bersama, dan ketentuan pembayaran yang adil. Kepastian usaha tumbuh ketika setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta risiko yang ditanggungnya.

Energi, Pembiayaan, dan Kepercayaan

Rekomendasi keempat menyangkut kemandirian energi dan transisi menuju energi terbarukan. Industri membutuhkan pasokan yang andal dengan harga kompetitif. Pengembangan energi domestik juga membuka kesempatan bagi usaha daerah melalui penyediaan lahan, jasa, peralatan, dan pemeliharaan.

Target pengembangan PLTS sebesar 100 gigawatt yang dibahas dalam bahan Rapimnas membuka ruang kemitraan pemerintah, PLN, Danantara, dan swasta. Pelaksanaannya perlu didukung kesiapan jaringan, kelayakan pembiayaan, kepastian pembelian listrik, serta perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Rekomendasi kelima adalah memperkuat pasar modal melalui pemulihan kepercayaan, perlindungan investor, dan penguatan basis investor domestik. Buy Indonesia membutuhkan pasar yang memiliki integritas. Investor perlu yakin bahwa informasi tersedia secara adil, manipulasi ditindak, dan hak pemegang saham dilindungi.

Agenda Kadin mencakup kejelasan pelaksanaan peningkatan free float, keterbukaan kepemilikan saham, pengawasan yang tegas, serta publikasi perkembangan reformasi. Perluasan partisipasi perusahaan asuransi dan dana pensiun harus tetap bertumpu pada tata kelola serta pertimbangan investasi yang sehat.

Jalur menuju pasar modal juga perlu diperluas bagi perusahaan manufaktur, perusahaan keluarga, dan UMKM yang memenuhi persyaratan. Pembiayaan jangka panjang akan semakin bermanfaat ketika menjangkau lebih banyak kegiatan produktif.

Memperluas Pasar, Menjaga Daya Beli

Rekomendasi keenam adalah memperkuat ekspor melalui diversifikasi produk, insentif usaha, dan perluasan akses pasar. Agenda kerja sama perdagangan, termasuk CPTPP, kerja sama dengan negara-negara Teluk melalui GCC, dan IEU-CEPA, perlu diikuti peningkatan kesiapan perusahaan nasional.

Peluang pasar membutuhkan kemampuan memenuhi standar, sertifikasi, volume, serta ketepatan pengiriman. UMKM memerlukan pendampingan mutu, kemudahan perizinan, dukungan sertifikasi halal, dan akses pembiayaan ekspor.

Kadin mendorong kemitraan melalui inclusive closed loop, inti-plasma, pengembangan pemasok industri, dukungan pembayaran rantai pasok, jaringan distribusi dan ritel, serta pelibatan vendor lokal di kawasan usaha. Dengan demikian, ekspor dapat memperluas kesempatan bagi pelaku usaha di berbagai lapisan.

Rekomendasi ketujuh berkaitan dengan perpajakan yang mendukung sektor hulu dan produksi nasional. Restitusi tepat waktu membantu perusahaan menjaga arus kas, membayar pekerja dan pemasok, serta melanjutkan produksi. Usulan PPh ditanggung pemerintah dan pembebasan PPN atas bahan baku pengganti impor perlu dirancang secara tepat sasaran dengan manfaat yang terukur.

Rekomendasi kedelapan adalah meningkatkan daya beli kelas menengah melalui penyesuaian penghasilan tidak kena pajak, menahan kenaikan PPN, serta mengkaji ruang penurunannya dengan mempertimbangkan ketahanan fiskal.

Daya beli rumah tangga menentukan permintaan terhadap hasil produksi. Ketika konsumsi terjaga, penjualan usaha memperoleh dukungan, pekerjaan lebih terlindungi, dan investasi memiliki alasan untuk tumbuh.

Mengawal Pelaksanaan

Delapan rekomendasi tersebut membutuhkan disiplin pelaksanaan. Kadin mengusulkan strategi 5D: disiplin dan desentralisasi fiskal; deregulasi; debottlenecking atau penguraian hambatan usaha; Danantara sebagai penggerak kemitraan investasi; serta dukungan bagi UMKM untuk naik kelas.

Dalam dokumen rekomendasi, 43% usulan berkaitan dengan regulasi dan informasi. Hal ini memperlihatkan besarnya ruang perbaikan melalui penyelarasan aturan, kejelasan prosedur, dan koordinasi antarlembaga.

Untuk mengawal tindak lanjut pada 2027, Kadin menyiapkan delapan kelompok kerja yang mencakup pengembangan pelaku usaha; rantai nilai dan logistik; hilirisasi dan energi; produktivitas, SDM, dan teknologi; ketahanan ekonomi dan industri pertahanan; diplomasi ekonomi; penguatan kelembagaan; serta kedaulatan pangan.

Evaluasi direncanakan setiap tiga bulan dengan melibatkan jaringan Kadin di 38 provinsi. Pengawalan ini penting agar kebutuhan daerah masuk dalam penyelesaian kebijakan dan hasilnya dapat dirasakan pelaku usaha.

Penguatan kelembagaan Kadin juga kami arahkan pada peningkatan pelayanan: membantu UMKM naik kelas, memperluas pendidikan vokasi dan riset, memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis, serta mempertemukan perusahaan nasional dengan mitra internasional.

Seluruh agenda tersebut berada dalam semangat Indonesia Incorporated. Pemerintah menghadirkan kepastian kebijakan dan pelayanan publik yang mendukung. Dunia usaha menggerakkan investasi, produksi, inovasi, dan penciptaan pekerjaan. Kadin menjembatani kemitraan agar kesempatan menjangkau pusat hingga daerah.

Keberhasilannya akan terlihat pada semakin banyaknya UMKM yang naik kelas, bertambahnya pemasok lokal dalam rantai industri, meningkatnya pekerjaan berkualitas, dan meluasnya produk Indonesia di pasar dunia.

Desa yang produktif memperkuat industri. Industri yang kompetitif membuka pasar dunia. Ketika hasilnya kembali menyejahterakan masyarakat, ekonomi kerakyatan menjadi kekuatan Indonesia untuk mendunia.

DAFTAR ISI

Anindya Bakrie Tetapkan Tiga Rekomendasi Rapimnas Kadin 2026 dan Usung Buy from Indonesia untuk Perkuat Perdagangan Nasional 10

Anin: Dari Desa ke Pasar Dunia, UMKM Harus Naik Kelas 14

Rupiah Bisa Tembus Rp 21.000 Jika Praktik Goreng Saham Tak Dihentikan 17

Investasi Dalam Negeri Hampir Rp2.000 Triliun, Kadin: Kepercayaan Pengusaha Menguat di Dua Tahun Pertama Presiden Prabowo 21

Kadin Indonesia Gelar Dialog Geoeconomics Jelang Rapimnas, Bahas Kemitraan Publik-Swasta Menuju Negara Berpendapatan Tinggi 24

Kadin: “Buy Indonesia” & “Buy from Indonesia”, Pemulihan Kepercayaan Investor Menjadi Kunci 27

Kadin Himpun Aspirasi Dunia Usaha dan Siapkan Rekomendasi Strategis Jelang Rapimnas 2026 30

Jelang Rapimnas, Kadin Umumkan Pemenang Lomba Foto UMKM 32

Investasi Baru di Tengah Dinamika Geopolitik Global 34

Di Brussel, Kadin Dorong IEU-CEPA Perkuat Kemitraan Ekonomi Indonesia-Uni Eropa 37

Kadin Ajak Rusia Perluas Pembelian Produk Indonesia Lewat Indonesia-Russia Business Forum 39

Anindya Bakrie Temui Menko Yusril, Konsultasi Revisi UU Kadin 41

DAFTAR ISI

Kadin Usulkan Kolaborasi dengan ITPC untuk Perluas Promosi Produk Indonesia 43

Kadin Imbau MSCI Lebih Objektif dalam Menilai Pasar Modal Indonesia 45

Kadin Indonesia Tekankan Pentingnya Uji Tuntas HAM untuk Perkuat Daya Saing Usaha 47

Anindya Bakrie Soroti Daya Saing dan Kesenjangan Talenta di Indonesia dalam ITC Leadership Conclave 2026 49

67% Pelaku UMKM Perempuan, Ketum Kadin Dorong Ekspansi ke Pasar Global 51

Pengangguran Sarjana di Jatim Tertinggi, Pemagangan Nasional Jadi Jembatan ke Dunia Kerja 53

Kadin DIY Hadirkan Simfoni 1.001 Pembatik, Hidupkan Batik di Jantung Malioboro 56

Kadin dan KDEKS Lampung Susun Peta Jalan Green Banking untuk Perbankan Syariah 58

Kadin Jatim Dorong Impor Tembakau Virginia dari Pakistan Disertai Transfer Teknologi 60

HEADLINE

Anindya Bakrie Tetapkan Tiga Rekomendasi Rapimnas Kadin 2026 dan Usung Buy from Indonesia untuk Perkuat Perdagangan Nasional



Rapimnas Kadin 2026 dibuka secara resmi pada 29 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Jakarta – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2026 dengan tema "Peran Kadin dalam Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia" dan subtema "UMKM Naik Kelas, Ekonomi Indonesia Berkualitas", resmi dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan P. Roeslani. Rapimnas berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Rapimnas merupakan salah satu mekanisme Kadin Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dunia usaha kepada pemerintah, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Anin sapaan akrabnya menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global, terutama dalam sektor pangan, air, dan energi. Menurut Anin, ketiga sektor tersebut merupakan bagian penting dari kedaulatan Indonesia.

"Ketahanan daripada pangan, air, energi adalah bagian daripada kedaulatan Indonesia. Ini juga sering dikumandangkan oleh Pak Presiden Prabowo dan juga oleh Presiden Soekarno dengan Trisaktinya," ujar Anin.

Anin menilai, di tengah dinamika global yang mendorong berbagai negara memperkuat kesiapsiagaan dan cadangan strategis, Indonesia perlu terus membangun ketahanan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Anin juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan. Anin merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,1 persen, dibandingkan dengan kontraksi sebesar 13 persen pada 1998 dan minus 2,1 persen saat pandemi Covid-19 pada 2020.

"Menurut kami, lebih baik kita lihat fundamentalnya saja. Kita lihat tahun 1998 minus 13 persen, 2020 waktu Covid minus 2,1 persen, sedangkan sekarang plus 5,1 persen," kata Anin.

Meski demikian, Anin mengakui tekanan di pasar modal dan keuangan tetap perlu diwaspadai. Anin menyinggung arus keluar dana dari pasar modal sebesar Rp124 triliun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 40 persen, serta nilai tukar rupiah yang mencapai Rp18.170 per dolar AS.

Namun, menurutnya, sejumlah indikator lain masih menunjukkan ketahanan ekonomi, antara lain tren positif realisasi penanaman modal, pertumbuhan laba bersih emiten sekitar 16 persen, cadangan devisa sebesar 146 miliar dolar AS, serta pertumbuhan kredit secara tahunan sebesar 13,3 persen.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberi sambutan dalam pembukaan Rapimnas Kadin yang digelar pada 29 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Selain menjaga ketahanan ekonomi nasional, Anin menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan hingga ke daerah. Anin menyinggung dampak penyesuaian transfer ke daerah dan belanja modal terhadap aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Menurut Anin, efisiensi perlu menjadi langkah awal sebelum pemerintah dan dunia usaha mendorong peningkatan produktivitas. Anin juga menyambut upaya pemerintah untuk menangani tekanan ekonomi daerah agar ruang pertumbuhan kembali terbuka.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan P. Roeslani menekankan pentingnya investasi berkualitas yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Rosan menyampaikan berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, realisasi investasi selama triwulan IV-2024 hingga triwulan III-2026 mencapai Rp3.923,2 triliun, atau 30,1 persen dari target Rp13.032,8 triliun hingga 2029.

Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp1.998,7 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1.924,5 triliun, dengan asumsi kurs APBN Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Investasi tersebut telah menyerap 5,48 juta tenaga kerja.

"Tetapi memang, kalau kita lihat, investasi yang masuk ini tentunya kita harapkan adalah investasi yang berkualitas. Investasi yang berkualitas, kami melihatnya adalah investasi yang bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, ada transfer knowledge dan teknologi, dan tentunya adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas," kata Rosan.

Rosan menyebut, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal di suatu negara. Salah satunya adalah stabilitas, baik dari sisi politik, keamanan, maupun iklim investasi. Selain stabilitas, investor juga membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kata Rosan, investor cenderung menghindari perubahan kebijakan atau kondisi yang sulit diprediksi karena investasi membutuhkan perencanaan jangka panjang.

"Kita tidak suka ada hal-hal yang sifatnya tanpa kita bisa prediksi. Semuanya inginnya terukur, terstruktur, dan penuh dengan certainty atau kepastian," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo menyoroti penerimaan negara yang masih rendah akibat tax ratio Indonesia yang berada pada kisaran 10% hingga 11% dari produk domestik bruto.

Melihat kondisi tersebut, Hashim ingin pemerintah meniru langkah Kamboja yang mencatatkan rasio penerimaan negara hingga 18% meskipun memiliki pendapatan yang lebih rendah dibanding Indonesia.

Berdasarkan perbandingan rasio tersebut, Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah mengalami kurang pungut sekitar Rp1.500 triliun.

"Kita sekarang kurang pungut Rp1.500 triliun," ujar Hashim.

Ia menilai jika aparat penegak hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea dan Cukai bekerja sebagaimana mestinya, Indonesia seharusnya bisa mencatatkan surplus anggaran hingga Rp900 triliun seperti Kamboja.

"Kalau aparat kita, Pajak, dan Bea Cukai, bekerja semestinya, seharusnya, seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun," kata dia.

Guna mengatasi persoalan pendapatan dari area abu-abu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan pajak transaksi elektronik yang bertujuan mendongkrak penerimaan negara agar setara dengan Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

"Kita mulai dengan transaksi, digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November 2026," ujar Hashim.

Kebijakan pajak digital ini rencananya akan melibatkan seluruh bank milik pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, serta platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo untuk memungut dan menyetor pajak yang selama ini belum terpungut.

"Bantalan itu apa? satu, menjaga arus kas usaha dan tentunya juga negara dan juga fiskal daerah di dalamnya, dan daya beli rumah tangga sehingga usaha rakyat dan industri penyerapannya bisa kuat," kata Anin saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 dengan tema "Peran Kadin dalam Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia" dan subtema "UMKM Naik Kelas, Ekonomi Indonesia Berkualitas" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).

Selain penciptaan bantalan ekonomi, Anin menyoroti **dua** poin krusial lainnya, yaitu jaminan ketersediaan bahan baku. Dalam hal ini, memastikan pasokan bahan baku industri tetap terjaga dengan baik guna mendorong dan meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Sementara itu, rekomendasi **ketiga** adalah memperkuat kepastian berusaha agar Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan buku We Buy From Indonesia (WBFI) kepada Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo saat peluncuran buku WBFI dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (29/10/2026).

3 Rekomendasi Rapimnas Kadin 2026

Kadin Indonesia telah merangkum tiga poin utama rekomendasi hasil Rapimnas Kadin 2026 sebagai langkah konkret dunia usaha dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Anin menyampaikan ketiga rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, meliputi penguatan bantalan ekonomi untuk menghadapi guncangan global, menjaga ketersediaan bahan baku produksi, serta memperkuat kepastian berusaha agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Anin sapaan akrabnya menjelaskan, rekomendasi **pertama** adalah memperkuat bantalan ekonomi dalam menghadapi guncangan global. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga arus kas dunia usaha, kondisi fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta daya beli rumah tangga agar usaha rakyat dan industri tetap memiliki daya serap yang kuat.

Anin menyebut Indonesia telah mencatatkan surplus perdagangan sebesar 7 miliar dolar AS pada tahun ini, tetapi peluang peningkatan perdagangan melalui pembukaan perjanjian perdagangan baru tetap perlu dimanfaatkan.

"Kadin mengusung jargon untuk mendorong penguatan perdagangan dan investasi, yakni Buy from Indonesia dan Buy Indonesia," kata Anin.

Kadin juga memperkenalkan strategi 5D, yakni disiplin dan desentralisasi fiskal, deregulasi, debottlenecking, Danantara sebagai enabler, serta dukungan agar UMKM naik kelas.

Hadir sebagai narasumber dalam Rapimnas Kadin 2026 hari pertama, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Friderica Widyasari Dewi. Di hari kedua menghadirkan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji, serta Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mendampingi Menteri Hilirisasi dan Investasi RI/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani saat memberikan keterangan pers di Rapimnas Kadin yang digelar pada 29 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Selain agenda diskusi dan pembahasan strategis, selama penyelenggaraan Rapimnas pada 29-30 Oktober 2026, Kadin juga memfasilitasi pemeriksaan kanker payudara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh SELANGKAH (Semangat Lawan Kanker) by Siloam bekerja sama dengan Kadin Indonesia dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran serta akses terhadap deteksi dini kanker payudara.

Hadir dalam rangkaian acara Rapimnas, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa yang juga merupakan Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Kadin 2026, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pengarah Rapimnas 2026 M. Azis Syamsuddin, serta Wakil Ketua Umum Bidang Penyelenggaraan Acara Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas 2026 Ria Yusnita.

Rapimnas Kadin 2026 disponsori oleh Sinarmas Agribusiness and Food, Lippo Group, Bakrie Center Foundation, PT Danayasa Arthatama Tbk (SCBD), Yayasan Artha Graha Peduli, Artha Graha Group, Bank Artha Graha Internasional, PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, PT Astra International Tbk, PT Triputra Agro Persada Tbk, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Freeport Indonesia, Tempo Scan Pacific Tbk, Wiraraja Madura Industrial Estate III, Bluebird Group, PT Anindya Wiraputra Konsult, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Amazon Web Services Indonesia/PT Mastersystem Infotama Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN), PT Bank Mandiri, Asosiasi Aneka Industri Keramik (ASAKI), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Syam & Syam Law Office, PLN Icon Plus, PT Bosowa, Dayak Nusantara Bersatu, PT Chandra Asri Pacific Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Syariah Indonesia (Persero), AdaKami dan Tigalapan Investama Group.



Jajaran Dewan Pengurus Kadin berfoto bersama usai acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (29/10/2026).

Anin: Dari Desa ke Pasar Dunia, UMKM Harus Naik Kelas



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan arahan dan pandangan dalam Rapat Pengurus Lengkap (RPL) jelang Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (29/10/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa cita-cita membawa Indonesia mendunia harus bertumpu pada peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta keterlibatan usaha rakyat dalam rantai pasok industri. Investasi perlu mengalir hingga ke daerah, menggerakkan produksi, dan membuka jalan bagi produk Indonesia menembus pasar global.

"Tidak mungkin ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia tanpa UMKM naik kelas dan lapangan kerja berkualitas," ujar Anin, sapaan akrab Anindya, pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Melalui tema "Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia", Anin mengajak dunia usaha dan pemerintah membangun hubungan yang lebih kuat antara masuknya modal, pengembangan industri, pemberdayaan usaha rakyat, dan peningkatan ekspor. Ia merangkum arah tersebut dalam alur pembangunan usaha yang bergerak dari desa, masuk ke pabrik, kemudian menjangkau pasar dunia.

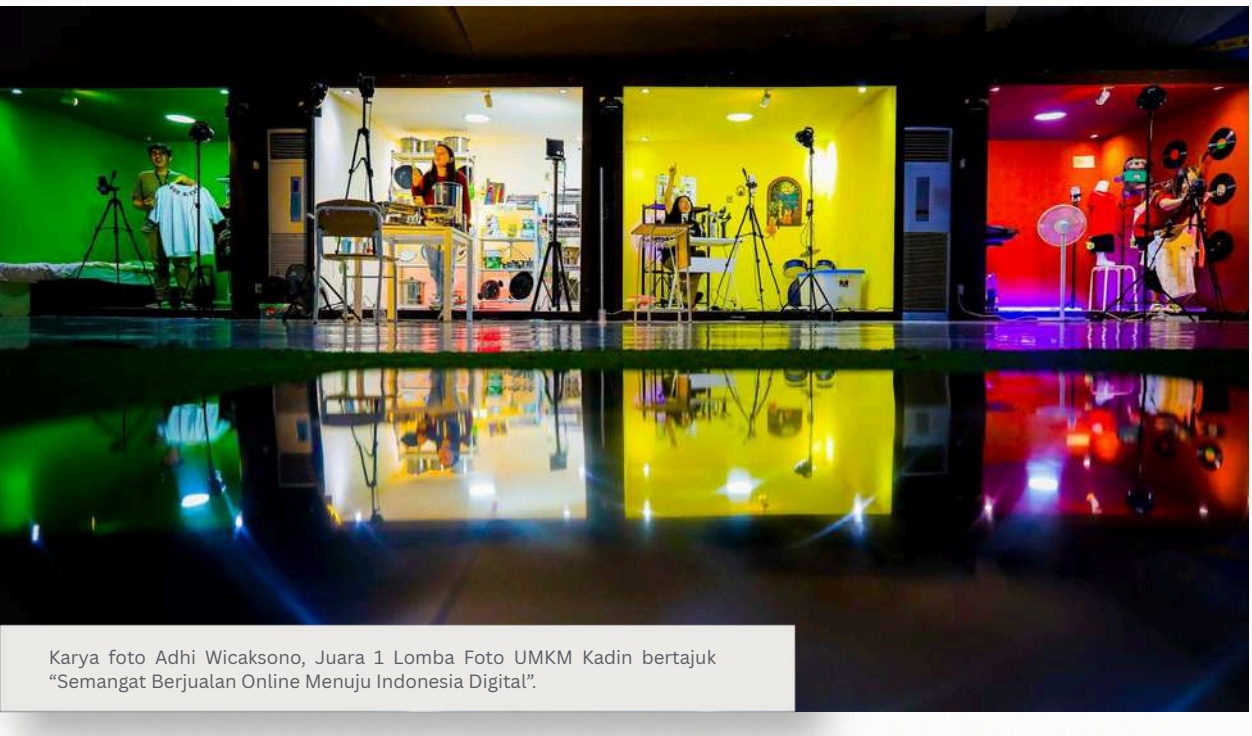
Menurut Anin, investasi akan memberikan manfaat lebih luas apabila usaha rakyat dapat terlibat dalam proses penciptaan nilai tambah. Pelaku usaha di desa perlu memperoleh kesempatan menjadi pemasok bahan baku, mitra produksi, penyedia jasa, maupun bagian dari jaringan distribusi industri. "Dari desa ke pabrik ke pasar dunia," katanya, menggambarkan arah pengembangan kemitraan yang ingin diperkuat Kadin.

Dalam kerangka itu, Anin menghubungkan dua agenda besar, yakni Buy Indonesia dan Buy from Indonesia. Agenda pertama diarahkan untuk menarik investasi ke Indonesia, baik melalui pasar modal maupun investasi langsung. Agenda kedua bertujuan memperbesar pembelian produk dan jasa Indonesia oleh pasar internasional.

Keduanya, menurut paparan Anin, merupakan bagian dari satu rangkaian kegiatan ekonomi. Modal yang masuk perlu mengembangkan kapasitas produksi dan memperluas keterlibatan pemasok domestik. Peningkatan produksi kemudian harus diikuti akses pasar agar investasi menghasilkan penjualan, pendapatan, dan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

Untuk memperlihatkan kemampuan produksi Indonesia, Anin memperkenalkan buku We Buy from Indonesia. Ia menyebut buku tersebut memuat kesaksian dan contoh keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi berbagai merek dunia.

Menurut Anin, terdapat 77 merek dalam paparan buku tersebut, termasuk Airbus, Tesla, dan Nike, yang menunjukkan hubungan produk maupun komponen Indonesia dengan pasar internasional. Ia juga menyinggung Kopiko sebagai contoh merek asal Indonesia yang menjangkau pasar global. "Tugas kita adalah meningkatkan komponen itu dan meningkatkan penjualannya," ujarnya.



Karya foto Adhi Wicaksono, Juara 1 Lomba Foto UMKM Kadin bertajuk "Semangat Berjualan Online Menuju Indonesia Digital".

Pesan yang ingin disampaikan, menurut Anin, adalah bahwa Indonesia telah memiliki pijakan dalam rantai pasok global. Pijakan tersebut perlu diperluas dengan meningkatkan jumlah pemasok, kapasitas produksi, mutu, dan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dan perluasan akses perdagangan. Berbagai kerja sama internasional harus dimanfaatkan untuk membuka peluang penjualan, sekaligus menarik investasi yang memperkuat industri domestik.

Dalam konteks ini, hubungan ekonomi internasional perlu menghasilkan kesempatan usaha yang konkret bagi perusahaan Indonesia, termasuk UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar.

Anin turut menyoroti hubungan antara pasar modal dan sektor riil. Menurut dia, komposisi perusahaan besar di pasar modal belum sepenuhnya mencerminkan keragaman kegiatan ekonomi Indonesia.

Ia melihat masih terbuka ruang bagi lebih banyak perusahaan sektor riil untuk mengakses pasar modal. Perluasan tersebut dapat memperkaya pilihan investasi sekaligus membuka sumber pembiayaan bagi kegiatan produksi.

Anin memahami bahwa penilaian pasar modal mempertimbangkan prospek pertumbuhan dan ekspektasi masa depan. Namun, semakin luas keterwakilan sektor riil, semakin besar pula kesempatan pasar modal mendukung pengembangan usaha di berbagai bidang.

Untuk memperkuat hubungan antara perusahaan besar dan usaha rakyat, Kadin menyiapkan sejumlah model kemitraan. Anin menyebut inclusive closed loop, pola inti-plasma, kemitraan produksi, pengembangan pemasok industri, pembiayaan rantai pasok, kemitraan distribusi dan ritel, serta pelibatan vendor lokal di kawasan industri.

Melalui pola-pola tersebut, usaha rakyat diharapkan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pasar, pembiayaan, teknologi, dan kebutuhan produksi industri. Kemitraan perlu menghasilkan hubungan usaha yang berkelanjutan agar peningkatan kapasitas UMKM diikuti permintaan yang nyata.

Anin juga menyampaikan pentingnya konsep Indonesia Incorporated, yakni kerja bersama pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi nasional. Ia menyinggung disiplin fiskal, deregulasi, serta penyelesaian hambatan investasi sebagai bagian dari agenda tersebut.

Dalam kerangka itu, Danantara diharapkan berperan sebagai pendukung yang memungkinkan pemerintah dan swasta mengembangkan kegiatan investasi bersama. Dunia usaha, pada saat bersamaan, perlu memperkuat keterlibatannya dalam peningkatan kelas usaha rakyat.



Karya foto Sofyan Efendi, Finalis Lomba Foto UMKM Kadin yang mengusung proses pengeringan biji kopi yang merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor, dengan inovasi penggunaan panel surya.

8 Kelompok Kerja

Untuk memastikan agenda Rapimnas memiliki tindak lanjut, Anin mengumumkan pembentukan delapan kelompok kerja. Kelompok pertama menangani peningkatan kelas pelaku usaha, termasuk koperasi dan UMKM. Kelompok kedua berfokus pada rantai nilai usaha rakyat, infrastruktur, dan logistik. Kelompok ketiga menangani hilirisasi, energi, dan nilai tambah.

Kelompok keempat diarahkan pada produktivitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi. Kelompok kelima menangani ketahanan ekonomi dan industri pertahanan. Kelompok keenam berfokus pada diplomasi ekonomi dan perjanjian dagang. Kelompok ketujuh menangani penguatan kelembagaan Kadin dan daerah, sedangkan kelompok kedelapan mengawal kedaulatan dan ketahanan pangan.

Anin menegaskan bahwa pelaksanaan program akan dipantau setiap tiga bulan. Pemantauan berkala itu dimaksudkan agar agenda kerja dapat dinilai kemajuannya dan hambatan pelaksanaan segera ditangani.

"Supaya bukan hanya setiap tahun kita bicara mengenai program-program ini," ujarnya.

Menurut Anin, penyusunan agenda Rapimnas telah didahului konsolidasi dengan daerah dan berbagai bidang organisasi. Ia menyebut pelaksanaan rapat pimpinan provinsi secara serentak di 38 provinsi serta 12 rapat koordinasi nasional.

Kadin juga menggelar pertemuan untuk merespons perkembangan strategis dan menjalankan Kadin Business Pulse setiap kuartal. Masukan tersebut digunakan untuk membaca kondisi dunia usaha dan merumuskan respons yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Anin berharap kerja bersama pemerintah, perusahaan besar, UMKM, serta pengusaha daerah dapat menerjemahkan potensi Indonesia menjadi peningkatan produksi dan kesejahteraan. Investasi yang masuk perlu membuka jalan bagi usaha rakyat untuk tumbuh, sementara perluasan pasar global harus memberikan manfaat hingga ke desa.

Menutup sambutannya, Anin mengutip pesan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo: "One thousand friends too few, one enemy too many." Ia mengajak dunia usaha memperluas kerja sama untuk menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

"Majulah Indonesia, majulah Kadin," katanya.



Rupiah Bisa Tembus Rp 21.000 Jika Praktik Goreng Saham Tak Dihentikan



Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo memperingatkan bahwa nilai tukar rupiah berisiko melemah hingga Rp21.000 per dolar Amerika Serikat apabila kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia terus memburuk. Risiko tersebut dapat membesar jika persoalan yang disoroti MSCI tidak segera ditangani dan Indonesia diturunkan menjadi pasar berstatus standalone.

Berbicara pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim meminta dunia usaha memandang persoalan tersebut sebagai ancaman serius. Dampaknya bisa meluas dari penurunan harga saham menjadi tekanan terhadap rupiah, kenaikan beban pembayaran utang valuta asing, hingga gangguan terhadap kegiatan ekonomi.

“Karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000–Rp21.000. Ada yang bilang Rp22.000,” ujar Hashim, yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Angka tersebut disampaikan sebagai peringatan mengenai skenario risiko apabila arus keluar dana asing berlanjut. Dalam pidatonya, Hashim tidak memaparkan metode penghitungan maupun jangka waktu kemungkinan tercapainya kurs tersebut.

Ia mengingatkan, pelemahan rupiah yang terlalu dalam akan meningkatkan kebutuhan rupiah untuk membayar kewajiban dalam valuta asing. Perusahaan yang memperoleh pendapatan terutama dalam rupiah, tetapi memiliki pinjaman dolar AS, menghadapi risiko kenaikan beban pembayaran apabila kewajiban itu tidak terlindungi secara memadai. “Pinjaman luar negeri kita harus dibayar lebih mahal. Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia,” katanya.

Secara ilustratif, kewajiban sebesar US$1 juta membutuhkan Rp18 miliar pada kurs Rp18.000 per dolar AS. Jika kurs melemah menjadi Rp21.000, kebutuhan rupiahnya meningkat menjadi Rp21 miliar. Ada tambahan kebutuhan Rp3 miliar, atau sekitar 16,7%, meskipun jumlah kewajiban dalam dolar tidak berubah. Dampak aktual terhadap setiap perusahaan bergantung pada lindung nilai, pendapatan valuta asing, serta waktu pembayaran kewajibannya.

Karena itu, peringatan Hashim menyangkut kepentingan yang lebih luas daripada portofolio investor saham. Tekanan kurs dapat menjalar ke biaya bahan baku impor, barang modal, arus kas perusahaan, serta kemampuan pelaku usaha mempertahankan ekspansi.

Hashim mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memintanya membantu Rosan Roeslani dan jajaran pemerintah memitigasi persoalan yang dihadapi Indonesia terkait MSCI.



(Dari Kanan) Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Menteri Hilirisasi dan Investasi RI/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Tujuannya agar tekanan terhadap pasar modal tidak berkembang di luar kendali. "Saya diminta oleh Presiden untuk membantu Pak Rosan dan kawan-kawan di pemerintah," ujarnya.

Menurut Hashim, salah satu risiko terbesar adalah menyusutnya sumber dana bagi pasar modal Indonesia apabila status pasar diturunkan. Sebagian investor asing dapat menghadapi kewajiban menyesuaikan portofolionya dengan mandat investasi dan indeks acuan yang digunakan. "Kalau MSCI tidak kita mitigasi, berarti sumber dana untuk pasar modal kita akan nanti semakin kering. Banyak akan nanti keluar karena terpaksa kalau kita di-downgrade menjadi standalone market," katanya.

Peringatan itu muncul ketika MSCI sedang menjalankan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Dalam pengumuman 15 Oktober 2026, MSCI menyoroti ketidaktransparanan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta perlunya bukti penegakan dan perbaikan tata kelola yang konsisten. Konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan paling lambat 30 Juni 2027. Dengan demikian, penurunan klasifikasi tersebut belum merupakan keputusan final.

Dalam skenario yang diperingatkan Hashim, penjualan saham oleh investor asing dapat diikuti penukaran hasil penjualan dari rupiah ke valuta asing untuk dipindahkan ke luar negeri. Jika berlangsung dalam jumlah besar dan tidak diimbangi aliran dana masuk atau pasokan valuta asing yang memadai, proses tersebut dapat menambah tekanan terhadap rupiah. Namun, besarnya perubahan kurs tidak ditentukan oleh arus dana saham saja.

"Ada indikasi memang ada praktik-praktik yang tidak sehat yang terjadi di pasar saham kita. Saya tidak usah sebut siapa, tetapi ada saham-saham yang istilahnya digoreng," ujarnya. Ia tidak menyebut nama saham, perusahaan, ataupun pihak yang dituding terlibat. Sorotannya diarahkan pada perilaku perdagangan yang merusak kredibilitas pasar dan dapat menimbulkan kerugian bagi investor lain.

Jumlah saham publik yang terbatas dan valuasi tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan manipulasi. Namun, dalam pidatonya, Hashim menekankan perlunya menghentikan praktik pengaturan perdagangan yang membuat harga kehilangan kewajaran dan mengikis kepercayaan investor. "Saya mohon kepada kawan-kawan dari Kadin, ini masalah sangat-sangat serius," katanya.

Hashim kemudian meminta anggota Kadin tidak ikut dalam praktik tersebut. Menurut dia, kepentingan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi investor harus menjadi perhatian bersama dunia usaha. "Mohon kegiatan-kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah berkehendak mengambil tindakan tegas. Sebagai peringatan, Hashim menyinggung penindakan terhadap pelaku pasar di Turkiye. Ia berharap persoalan serupa tidak menyeret pelaku usaha Indonesia.

Besarnya jumlah masyarakat yang berinvestasi menjadi alasan lain bagi pemerintah untuk menangani persoalan pasar modal secara serius. Dengan merujuk informasi yang disebutnya diperoleh dari OJK, Hashim menyampaikan angka 32,7 juta warga Indonesia yang memiliki akun investasi atau brokerage accounts. Dalam pidato tersebut, ia tidak merinci cakupan statistik yang digunakan.

Hashim menilai penurunan nilai investasi telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin. Ia mengakui dirinya juga merasakan dampak penurunan harga saham. "Saya juga punya saham di perusahaan publik. Saya tidak puas. Maka pemerintah hendaknya memperhatikan masalah ini," ujarnya.

Menurut Hashim, pemerintah dan dunia usaha harus bersedia membicarakan kabar buruk secara terbuka agar langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Optimisme mengenai prospek ekonomi perlu disertai keberanian menghadapi persoalan yang sedang berlangsung. "Kabar gembira, saya kira tahun depan bisa datang. Tetapi kabar buruk harus sekarang kita hadapi," katanya.

Di tengah peringatan mengenai pasar modal, Hashim tetap menyampaikan keyakinan terhadap potensi ekonomi Indonesia. Ia menilai kemampuan negara membiayai pembangunan dapat diperkuat melalui perbaikan pemungutan penerimaan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Hashim berpendapat bahwa besarnya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara. Ia mencontohkan berbagai transaksi jasa dan usaha kecil yang berlangsung secara tunai, kemudian mengaitkannya dengan kebutuhan memperbaiki administrasi serta memperluas pencatatan transaksi.

Ia mengutip perkiraan kegiatan ekonomi yang belum tercatat sekitar 35–40%, yang menurutnya bersumber dari Bank Dunia. Namun, dalam pidato itu ia tidak menyebut judul kajian maupun periode datanya. Angka tersebut merupakan rujukan yang dikemukakan Hashim, bukan hasil penghitungan baru yang dipaparkan dalam forum.

Dalam simulasi fiskalnya, Hashim menggunakan angka PDB sekitar Rp25.000 triliun dan rasio penerimaan negara sekitar 12%. Ia berpendapat, jika rasio penerimaan dapat ditingkatkan enam poin persentase menjadi 18%, tambahan penerimaan secara aritmetis mencapai Rp1.500 triliun per tahun.

Menurut Hashim, tambahan sebesar itu dapat memperbesar kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan dan mengurangi tekanan defisit. Meski demikian, angka tersebut merupakan ilustrasi potensi berdasarkan asumsi yang digunakannya, bukan realisasi penerimaan atau kepastian tambahan anggaran.

Hashim mengatakan pemerintah akan memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam administrasi perpajakan. Ia menyebut rencana pelaksanaan langkah yang disebutnya digital taxation pada 9 November 2026, dengan melibatkan perbankan serta platform digital dalam pemungutan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan.

Resilience by Record: Fundamental Ekonomi Riil Kokoh, meskipun mengalami Tekanan di Pasar Modal dan Keuangan



Pernyataan mengenai jadwal dan cakupan pelaksanaan itu disampaikan sebagai penjelasan Hashim mengenai rencana pemerintah. Dalam forum tersebut, ia tidak merinci dasar aturan maupun mekanisme teknisnya.

Selain penerimaan negara, Hashim menyoroti pentingnya inklusi keuangan. Ia mengatakan pemerintah telah memutuskan pemberian rekening bank gratis bagi warga yang mencapai usia 17 tahun. Langkah tersebut, menurut dia, diharapkan mempermudah penyaluran bantuan sosial langsung kepada penerima yang berhak.

Hashim secara khusus menegaskan bahwa yang dimaksud adalah rekening bank gratis, bukan pemberian telepon seluler gratis. Ia meminta media tidak memelintir pernyataannya.

Dengan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, Hashim berharap daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi daerah bergerak lebih kuat.

Ia menilai peluang usaha akan bertambah apabila penerimaan negara membaik dan pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan. "Masa depan Indonesia bukan gelap. Indonesia tidak gelap, Indonesia terang," ujarnya.

Namun, optimisme itu disertai desakan agar persoalan kepercayaan investor segera dibenahi. Hashim mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik pasar yang tidak sehat dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan politik yang luas. "Jangan sampai rupiah jadi Rp21.000, Rp22.000. Ini punya dampak politik yang luar biasa negatif," katanya.

Bagi Hashim, menghentikan praktik goreng saham merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional: menjaga kepercayaan investor, mempertahankan sumber pembiayaan dunia usaha, dan mencegah tekanan pasar modal menjalar menjadi persoalan yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut kedatangan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo jelang acara pembukaan Rapimnas Kadin 2026, di Hotel Borobudur (29/10/2026).



Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan Peserta Rapimnas Kadin Seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Investasi Dalam Negeri Hampir Rp2.000 Triliun, Kadin: Kepercayaan Pengusaha Menguat di Dua Tahun Pertama Presiden Prabowo

Jakarta – Optimisme pengusaha Indonesia terhadap prospek perekonomian nasional terus menguat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut tercermin dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai hampir Rp2.000 triliun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, dengan kontribusi investasi domestik yang lebih dari separuh total investasi nasional.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa besarnya kontribusi investasi domestik menunjukkan peran strategis pengusaha nasional, termasuk pelaku usaha kelas menengah, dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam investasi menjadi salah satu modal penting untuk menjaga daya tahan perekonomian di tengah ketidakpastian global.

“Kalau dilihat PMDN itu juga melibatkan teman-teman di kelas menengah. Nah ini kami lihat bisa membuat sekali lagi daya tahan kita justru semakin kuat,” ujar Anindya dalam laporannya pada acara Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan Peserta Rapimnas Kadin Seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Lebih lanjut, Anindya menyampaikan bahwa dunia usaha juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan industri masa depan, tidak hanya memperkuat industri yang telah berjalan. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan antara lain industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), energi terbarukan (renewable energy), dan pusat data (data center) yang memiliki potensi penggunaan komponen lokal cukup besar.

“Bukan saja untuk industri-industri yang sekarang, tapi industri masa depan. Seperti industri EV, renewable energy, data center yang memang komponen lokalnya juga banyak. Bapak dan tentunya Pak Presiden, tema rapimnas kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia,” imbuh Anindya.

Anindya juga menyoroti besarnya peran sektor swasta dalam perekonomian nasional. Anindya menyebut dunia usaha memiliki ruang kontribusi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

“Ekonomi kerakyatan sudah berjalan di dunia usaha. Kami menyadari dan ini merupakan tanggung jawab kami bahwa 4.000 triliun dari 25.000 triliun PDB adalah APBN. Sehingga sisanya atau sekitar 85 persen adalah uang yang dunia usaha bisa berkontribusi, dan inilah yang kita inginkan bukan hanya pengusaha-pengusaha daerah dan juga di asosiasi himpunan bisa tumbuh bersama-sama, naik kelas, tapi mereka juga bisa menjadi pemain besar kemudian hari,” ungkap Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya juga menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah berbagai gejolak global. Anindya menyebut Indonesia masih menjadi salah satu titik terang perekonomian dunia atau bright spot, sebagaimana pernah disampaikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

“Indonesia continues to be the bright spot. Ini telah disampaikan tahun lalu oleh IMF, dan terbukti bahwa Indonesia juga tetap menjadi bright spot. Di dalam lima guncangan ekonomi selama bisa dibilang 25 tahun, Indonesia adalah dari waktu ke waktu justru lebih kuat. Ini menandakan daya tahan kita sangat resilient,” ungkapnya.

Optimisme tersebut memperlihatkan kesiapan dunia usaha untuk menjadi salah satu penggerak utama pembangunan nasional. Melalui penguatan investasi domestik, pengembangan industri masa depan, dan pemberdayaan pengusaha daerah, Kadin menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kuat serta membawa Indonesia semakin diperhitungkan di panggung dunia.

Dua Tahun Investasi Riil Dunia Usaha

Diresmikan atau mulai beroperasi, Oktober 2024 – Oktober 2026
Dunia Usaha Nasional & Asing



PLTP Ijen Unit 1
Medco Power · Ormat



PLTP Sorik Marapi 5
KS Orka (SMGP)



PLTP Salak Binary
Star Energy Geothermal



HPAL Weda Bay
Blue Sparking Energy



Baterai EV Weda Bay
REPT Battero Indonesia



Aluminium Weda Bay
Pioneer Aluminum Ind.



Alat Berat Weda Bay
XCMG Indonesia



Mobil Listrik Subang
VinFast



Mobil Listrik Subang
BYD Indonesia



Bus & Truk Listrik
VKTR (Bakrie Group)



Pabrik Mobil Karawang
Astra Daihatsu Motor



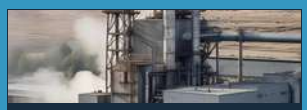
Petrokimia LINE
Lotte Chemical



Cloud Region
Microsoft



HPAL ENC Morowali
Nickel Industries · UT



◆ HPAL SLNC Morowali
Merdeka Battery



◆ HPAL Pulau Obi
Harita Nickel



◆ Smelter Tembaga NTB
Amman Mineral



◆ Baterai LFP Batang
LBM Energi Baru



◆ Alat Kesehatan Batang
Ace Medical (Allmed)



◆ Daur Ulang Batang
Green Java Solution



◆ Mobil Purwakarta
Handal Indonesia Motor



◆ Data Center Nongsa
Nongsa Digital Park



◆ Tol Kediri–Tulungagung
Grup Gudang Garam



Baterai EV Karawang
CATL · Brunp · Lygend · IBC



Smelter Emas Gresik
Freeport Indonesia



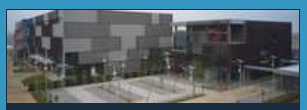
PLTGU Jawa-1
Jawa Satu Power



HPAL Pomalaa
Vale · Huayou · Ford



◆ HPAL Bahodopi
Vale Indonesia



Data Center Batam
Telkom · Singtel



◆ Tol Ciawi–Sukabumi
Trans Jabar Tol



RDMP Balikpapan
Pertamina (KPI)



TBBM Tanjung Batu
Pertamina Patra Niaga



PLTA Jatigede
PLN



PLTA Asahan 3
PLN



PLTGU Muara Tawar
PLN



PLTGU Tambak Lorok
PLN



Amonia Bontang
Pupuk Kaltim



◆ Tol Probowangi
Jasa Marga · Adhi Karya



◆ Tol Jogja–Solo
Jasa Marga · Adhi · PP



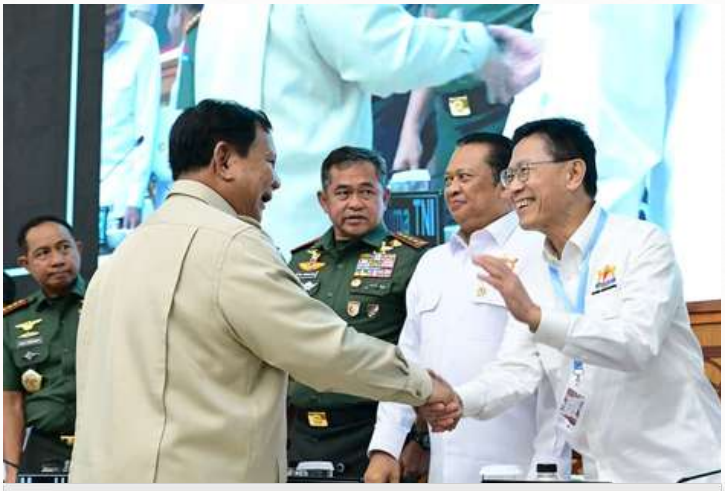
Presiden RI, Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung di sela-sela acara Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan Peserta Rapimnas Kadin Seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM dan penyiapan pemimpin masa depan menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemajuan Indonesia.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riyadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pembangunan manusia sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, pembangunan SDM, khususnya dalam membentuk karakter dan kapasitas kepemimpinan, merupakan salah satu faktor penting bagi suatu negara untuk menjadi bangsa yang besar.

“Hari ini pimpinan dunia usaha melihat seseorang Presiden yang luar biasa. Dia mencurahkan hati dia itu untuk pendidikan, untuk pembangunan manusia. Dia menceritakan betapa tidak ada bangsa yang besar itu yang tidak terkait dengan pembangunan manusia, khususnya pemimpin-pemimpin itu yang punya karakter dan dia menceritakan ini semua dengan satu hati yang luar biasa, tulus, tapi dia ingin supaya Indonesia ini negara yang maju, negara yang dihormati oleh semua,” ujar James.



Presiden RI, Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady di sela-sela acara Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan Peserta Rapimnas Kadin Seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Selain itu, James juga mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, termasuk mereka yang berasal dari kelompok masyarakat tertinggal, untuk berkembang melalui sistem meritokrasi. James menilai, P3MDI menjadi salah satu wujud visi Presiden Prabowo dalam menyiapkan calon pemimpin Indonesia melalui proses seleksi dan pembinaan yang terarah.

“Ini visi beliau, dia punya visi dan dia punya perut (keberanian) untuk menjalankan visi itu menjadi nyata. Jadi kita tidak ada jalan lain, kita harus mendukung karena mereka ini 300 sekian anak-anak muda ini sudah S1, sudah pengalaman 1-2 tahun dan akan dilatih secara intensif selama 9 bulan. Dengan perhatian-perhatian dan juga dengan screening process sehingga saya yakin ini lihat muka mereka, wajah mereka, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang,” ungkapnya.

Senada dengan James, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, mengapresiasi taklimat Presiden Prabowo yang dinilainya memberikan wawasan mengenai tanggung jawab negara dalam mendorong kemajuan bangsa. Mulyadi menyebut perhatian pemerintah terhadap berbagai program pembangunan, termasuk di bidang pangan, pendidikan, dan keamanan, merupakan hal yang perlu didukung bersama.

“Luar biasa. Taklimat Bapak Presiden ini, Bapak Prabowo ini, dengan umur waktu diri saya 2 tahun, luar biasa. Memberikan wawasan kepada kita, bagaimana tanggung jawab negara. Negaranya harus maju, dan ini sangat luar biasa,” kata Mulyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan, termasuk melalui P3MDI. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan generasi pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan Indonesia.

“Mari kita bersama-sama antara swasta dengan pemerintah karena Kadin sebagai mitra. Kita dukung MDI ini. Supaya ketahanan pangan bisa tercapai oleh kita. InsyaAllah tercapai,” pungkasnya.

Kadin Indonesia Gelar Dialog Geoeconomics Jelang Rapimnas, Bahas Kemitraan Publik-Swasta Menuju Negara Berpendapatan Tinggi



Dean and CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Prof. Bambang Brodjonegoro (dua dari kanan) menyampaikan paparannya dalam Geoeconomics Policy Dialogue bertema "Public-Private Partnerships in Escaping the Middle-Income Trap Amidst Geopolitical Shifts" di Hotel Marriott Gelora, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Geoeconomics Policy Dialogue bertema "Public-Private Partnerships in Escaping the Middle-Income Trap Amidst Geopolitical Shifts" menjelang penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Marriott Gelora, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).

Acara tersebut menghadirkan narasumber di antaranya Dean and CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Prof. Bambang Brodjonegoro, Dean of INSEAD Prof. Francisco Veloso dan Director of International Development at INSEAD Michaela Felber.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Diungkapkan Anin sapaan akrabnya bahwa 92% produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari luar belanja pemerintah, yakni investasi, ekspor, dan konsumsi domestik.

"Kadin adalah suara independen dunia usaha yang dimandatkan melalui undang-undang, dan kami memahami dengan jelas bahwa 92% PDB kita berasal dari luar belanja pemerintah, yaitu investasi, ekspor, serta konsumsi domestik," kata Anin.

Lebih lanjut Anin juga menyoroti pentingnya industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Anin mengatakan, indeks manufaktur Indonesia turun dari 32% pada 2002 menjadi sekitar 19% saat ini.

"Untuk tumbuh, kita perlu melakukan industrialisasi. Indeks manufaktur kita turun dari 32% pada 2002 menjadi sekitar 19% sekarang," tutur Anin.

Menurut Anin, peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, serta inklusif.

Anin juga menekankan, Indonesia perlu memanfaatkan peluang bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. "Presiden kita menargetkan pertumbuhan 8% dengan alasan yang jelas, yakni untuk berupaya keluar dari middle-income trap, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain sebelumnya," jelas Anin.



Dean and CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Prof. Bambang Brodjonegoro (kanan) bersama Dean of INSEAD Prof. Francisco Veloso dalam Geoeconomics Policy Dialogue di Hotel Marriott Gelora, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).



(Dari kiri) Dean and CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Prof. Bambang Brodjonegoro bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri, Bernardino Vega dalam Geoeconomics Policy Dialogue di Hotel Marriott Gelora, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).

Sementara itu, Dean and CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Prof. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman Jepang dan Korea Selatan yang mengembangkan industri manufaktur hingga menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Ini yang berbahaya dan bisa terjadi di banyak negara Asia Tenggara. Mereka bergerak di bidang manufaktur, melakukan ekspor, tetapi tidak meningkatkan teknologi. Artinya, daya saing mereka seiring waktu akan menurun," kata Bambang.

Menurut dia, pengembangan industri tidak cukup hanya melalui kegiatan manufaktur dan perakitan. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi, meningkatkan kemampuan rekayasa, dan mengembangkan inovasi.

Bambang pun mencontohkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berkembang dari bisnis awal berbeda sebelum memasuki industri teknologi dan manufaktur. Samsung, misalnya, pada 1960-an bergerak di bidang perdagangan gula. Sementara itu, LG memulai bisnis dari kosmetik, Hyundai dari pekerjaan konstruksi, SK dari tekstil dan Daewoo dari perdagangan.

Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian berkembang ke berbagai sektor industri. Samsung menjadi perusahaan elektronik, Hyundai mengembangkan industri otomotif, sedangkan SK bergerak di bidang telekomunikasi.

"Pemerintah harus mendorong sektor swasta untuk bersama-sama membawa negara keluar dari middle-income trap," ujar Bambang.

Sementara itu, Dean of INSEAD Prof. Francisco Veloso mengatakan bahwa perubahan global menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Ia menyoroti pentingnya pengembangan keterampilan yang relevan untuk menghadapi revolusi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan perubahan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

"Dunia sedang berada dalam masa transisi. Ada banyak tantangan, tetapi juga banyak peluang. Revolusi kecerdasan mengubah cara kita melangkah ke depan. Karena itu, mengembangkan keterampilan yang tepat untuk masa depan akan menjadi semakin penting," kata Veloso.

Ia berharap dialog tersebut dapat memperkuat kolaborasi untuk mendukung perkembangan Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Veloso juga menyoroti peran perusahaan keluarga dalam perekonomian Indonesia, yang menjadi salah satu bidang keahlian INSEAD.

"Kami berfokus, khususnya, pada peran yang telah dimainkan perusahaan keluarga di Indonesia dan peran yang dapat mereka jalankan di masa depan. INSEAD memiliki banyak keahlian di bidang ini. Kami berharap forum ini menjadi ruang yang produktif bagi kami untuk terus berkolaborasi pada masa mendatang," ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Dean and CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Prof. Bambang Brodjonegoro menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Pada kesempatan yang sama, Kadin Indonesia dan ADBI juga secara resmi meluncurkan working paper bersama yang membahas peran sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Kadin Indonesia dan INSEAD. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi Kadin Indonesia dengan lembaga akademik dan pengembangan internasional dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Dean and CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Prof. Bambang Brodjonegoro menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Hotel Marriott Gelora, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026). Pada kesempatan yang sama, Kadin Indonesia dan ADBI juga secara resmi meluncurkan working paper bersama yang membahas peran sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan cinderamata kepada Dean of INSEAD Prof. Francisco Veloso dalam acara Geoeconomics Policy Dialogue di Hotel Marriott Gelora, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan cinderamata kepada Dean of INSEAD Prof. Francisco Veloso dalam acara Geoeconomics Policy Dialogue di Hotel Marriott Gelora, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro, WKU Bidang Penyelenggaraan Acara Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana Rapimnas Kadin 2026 Ria Yusnita, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, WKU Bidang Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Akbar Habibie dan Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian acara Rapimnas dan turut disponsori oleh Sinarmas Agribusiness and Food, Lippo Group, Bakrie Center Foundation, Yayasan Artha Graha Peduli, Artha Graha Group, PT Astra International Tbk, PT Triputra Agro Persada Tbk, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Freeport Indonesia, Tempo Scan Pacific Tbk, Wiraraja Madura Industrial Estate III, Bluebird Group, PT Anindya Wiraputra Konsult, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Amazon Web Services Indonesia/PT Mastersystem Infotama Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN), PT Bank Mandiri, Asosiasi Aneka Industri Keramik (ASAKI), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Syam & Syam Law Office, PLN Icon Plus, PT Bosowa, Dayak Nusantara Bersatu, PT Chandra Asri Pacific Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Syariah Indonesia (Persero), AdaKami dan Tigalapan Investama Group.

Kadin: "Buy Indonesia" & "Buy from Indonesia", Pemulihan Kepercayaan Investor Menjadi Kunci



Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu (kiri) saat menjadi moderator dalam Press Conference Jelang Rapimnas Kadin 2026 di Menara Kadin Indonesia, (22/10/2026).

Jakarta – Dengan semangat Indonesia Incorporated, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menempatkan pemulihan kepercayaan investor sebagai fondasi gerakan "Buy from Indonesia" dan "Buy Indonesia" yang akan diusung dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29–30 Oktober 2026. Kedua gerakan tersebut diarahkan untuk memperbesar ekspor, menggerakkan investasi, dan membuka peluang usaha hingga ke daerah guna menciptakan pelaku-pelaku ekonomi baru, sesuai dengan tema Rapimnas Kadin 2026 yaitu "Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia (UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas)".

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan investor asing langsung atau foreign direct investment (FDI) maupun investor portofolio. Kepercayaan tersebut perlu dibangun melalui kepastian hukum, konsistensi kebijakan, transparansi informasi, serta perlindungan hak investor.

Menurut Anindya, yang akrab disapa Anin, investor FDI membutuhkan kepastian untuk membangun dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Sementara itu, investor portofolio memerlukan pasar keuangan yang transparan, likuid, dan memiliki integritas perdagangan agar dapat menilai peluang serta risiko secara wajar.

Karena itu, ajakan membeli produk dan berinvestasi di Indonesia harus ditopang perbaikan tata kelola yang dapat dibuktikan. Penghormatan terhadap kontrak, perlindungan hak kepemilikan, dan penegakan aturan yang7 konsisten menjadi dasar untuk mempertahankan investasi yang sudah ada sekaligus menarik penanaman modal baru.

"Pesan sederhananya adalah: beli produk Indonesia dan berinvestasilah di Indonesia. Tugas Kadin ialah memastikan bahwa ajakan tersebut didukung produk yang kompetitif, perusahaan yang terpercaya, dan proyek yang layak dibiayai," ujar Anin dalam bahan arahan menjelang Rapimnas, Kamis (22/10/2026).

Anin menjelaskan, Buy from Indonesia merupakan ajakan kepada pembeli internasional untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa dari Indonesia. Adapun Buy Indonesia mengajak investor domestik maupun asing menanamkan modal pada perusahaan dan kegiatan ekonomi di Indonesia, melalui pasar modal maupun investasi langsung.

Kedua agenda tersebut harus menjawab kebutuhan konkret dunia usaha. Pengusaha memerlukan pembeli, perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk berkembang, dan daerah membutuhkan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Seluruh jajaran Kadin hingga kabupaten dan kota perlu mengenali produk yang siap dipasarkan serta usaha yang layak ditawarkan kepada investor.

"Kedua tema ini saling menguatkan. Pesanan ekspor membuka kebutuhan investasi. Investasi memperbesar kapasitas dan meningkatkan mutu produksi, sehingga perusahaan dapat memenuhi lebih banyak pesanan," jelasnya.

Agenda tersebut mengemuka di tengah tekanan pasar keuangan. Dalam bahan arahannya, Anin menyoroti penurunan tajam IHSG dan pelemahan rupiah yang sempat melewati Rp18.000 per dolar AS. Bahan persiapan tersebut juga menyebut akumulasi penjualan bersih investor asing di pasar saham telah melampaui Rp92 triliun sejak awal tahun hingga 20 Oktober 2026.

Anin menilai usulan MSCI untuk mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market memperbesar kegelisahan investor. Persoalan transparansi kepemilikan dan perdagangan terkoordinasi menjadi sorotan. Meski belum menjadi keputusan akhir, usulan itu memperlihatkan besarnya pengaruh kepercayaan terhadap keputusan investasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa penjualan saham oleh investor asing tidak7 seluruhnya otomatis menjadi arus devisa keluar karena hasil penjualan dapat tetap berada di Indonesia. Tekanan terhadap rupiah dapat meningkat ketika investor mengonversi hasil penjualan tersebut ke valuta asing dan memindahkan dananya ke luar negeri.

Bagi dunia usaha di daerah, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya bahan baku dan mesin impor serta beban kewajiban dalam valuta asing. Ketidakpastian juga berpotensi menunda ekspansi perusahaan. Karena itu, respons Kadin perlu diarahkan pada penguatan kegiatan ekonomi dan kepastian berusaha.

Di tengah tantangan tersebut, Anin menegaskan bahwa Indonesia memiliki basis produksi dan pengalaman menarik investasi yang kuat. Mengutip publikasi tahunan BPS, ia menyebut ekspor barang Indonesia pada 2024 mencapai sekitar US$266,53 miliar, meningkat 2,70% dibandingkan 2023.

Sementara itu, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dikutip dalam arahannya mencatat realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penanaman modal dalam negeri menyumbang Rp1.030,3 triliun dan penanaman modal asing Rp900,9 triliun. Sebanyak 51,3% realisasi investasi berada di luar Jawa.

Menurut Anin, capaian tersebut menunjukkan besarnya peran pengusaha domestik dan daerah dalam menggerakkan investasi. Ia juga mengingatkan bahwa investasi langsung perlu dibaca terpisah dari pergerakan dana di bursa karena keduanya memiliki karakter dan jangka waktu berbeda.

Kemampuan industri nasional turut diperkenalkan melalui buku We Buy From Indonesia: Behind the World's Greatest Products yang disusun Anin. Buku tersebut menggambarkan kontribusi produsen Indonesia dalam rantai pasok sekitar 80 merek global, termasuk Tesla, IKEA, dan Uniqlo, melalui penyediaan bahan baku, komponen, maupun barang jadi.

Buku setebal 226 halaman yang tercatat dalam katalog UI Publishing sebagai terbitan 2026 itu disiapkan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Cakupannya meliputi industri alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, elektronik, serta kendaraan listrik.

Anin ingin pengalaman perusahaan yang telah memasok merek global menjadi bahan bagi anggota Kadin untuk memahami kebutuhan pasar dan standar produksi. Hubungan bisnis yang sudah terbangun juga perlu ditelusuri lebih lanjut untuk menemukan peluang penambahan pesanan, perluasan kapasitas, dan keterlibatan pemasok baru dari daerah.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kiri) menyampaikan paparannya dalam Press Conference Jelang Rapimnas Kadin 2026 di Menara Kadin Indonesia, (22/10/2026).



Wakil Ketua Umum Bidang Penyelenggaraan Acara Kadin Indonesia sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas 2026, Ria Yusnita saat menjadi pembicara dalam Press Conference Jelang Rapimnas Kadin, (22/10/2026).

"Dunia sudah membeli dari Indonesia. Tugas kita adalah memperluas pasar dan membuka peluang bagi lebih banyak pengusaha daerah," ujarnya.

Untuk menjalankan Buy from Indonesia, Anin meminta Kadin provinsi memilih produk unggulan berdasarkan permintaan pasar dan kemampuan memasok. Informasi mengenai produsen, kapasitas produksi, sertifikasi, serta hambatan usaha harus tersedia agar promosi dapat ditindaklanjuti menjadi transaksi.

UMKM dapat berpartisipasi sebagai eksportir langsung maupun pemasok perusahaan yang telah memiliki jaringan ekspor. Peluang juga terbuka di sektor jasa, termasuk pariwisata, teknologi, desain, dan jasa profesional yang melayani pelanggan luar negeri.

Adapun melalui Buy from Indonesia, Kadin akan mendorong kesiapan perusahaan dan proyek untuk menerima investasi. Di pasar modal, Anin menekankan pentingnya informasi yang akurat, strategi bisnis yang jelas, serta perlakuan adil terhadap investor. Penilaian investasi harus memperhitungkan prospek dan risiko usaha karena penurunan harga saham saja belum membuktikan bahwa suatu saham murah.

Ia menjelaskan, pembelian saham di pasar sekunder mendukung likuiditas dan pembentukan harga, tetapi dananya berpindah kepada pemegang saham yang menjual. Perusahaan memperoleh dana baru melalui mekanisme seperti penawaran saham perdana, penambahan modal, atau penerbitan obligasi.

Untuk investasi langsung, setiap proyek perlu memiliki penanggung jawab yang jelas dan informasi memadai mengenai kebutuhan modal, sumber pendapatan, kesiapan lokasi, serta risiko pelaksanaan. Hubungan dengan pembeli global dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai prospek usaha, tetapi tetap harus disertai pemeriksaan kelayakan.

Anin juga meminta Kadin menyampaikan hambatan usaha kepada pemerintah berdasarkan bukti yang jelas, termasuk izin yang tertahan, lamanya proses, serta kegiatan ekspor atau investasi yang terhambat. Dengan demikian, advokasi dunia usaha memiliki arah penyelesaian yang terukur.

"Kepercayaan akan menguat ketika pengalaman pembeli dan investor sesuai dengan janji yang kita sampaikan," katanya.

Agar manfaatnya menjangkau daerah, Anin mencontohkan keterkaitan antara penjualan kopi dan investasi fasilitas pengolahan. Di sektor perikanan, kontrak penjualan hasil laut dapat ditopang pembangunan fasilitas pembekuan dan rantai dingin. Sementara di daerah industri, tambahan pesanan ekspor dapat membuka peluang perluasan pabrik dan pengembangan pemasok lokal.

Kadin pusat akan berperan menghubungkan penawaran daerah dengan jaringan pembeli dan investor, termasuk melalui mitra internasional dan komite bilateral. Kadin provinsi memimpin pemetaan produk dan proyek, sedangkan Kadin kabupaten dan kota mendampingi perusahaan serta memastikan kesiapan pasokan di lapangan.

Menurut Anin, keberhasilan gerakan ini harus diukur melalui transaksi dan investasi yang terealisasi. Untuk ekspor, indikatornya mencakup nilai pengiriman, pembeli baru, dan pembelian berulang. Untuk investasi, ukurannya meliputi modal yang direalisasikan, kemajuan ekspansi, serta kegiatan produksi dan pekerjaan yang tercipta.

"Melalui dua gerakan ini, Kadin mengajak seluruh anggotanya memperbesar ekspor, menggerakkan investasi, dan membangun kembali kepercayaan melalui hasil kerja yang nyata," tegas Anin.



(Dari kiri) Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia Primus Dorimulu, Hadir dalam Press Conference Jelang Rapimnas Kadin 2026, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa yang juga merupakan Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Kadin 2026, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pengarah Rapimnas 2026 M. Azis Syamsuddin, serta Wakil Ketua Umum Bidang Penyelenggaraan Acara Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas 2026 Ria Yusnita.

Kadin Himpun Aspirasi Dunia Usaha dan Siapkan Rekomendasi Strategis Jelang Rapimnas 2026



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan paparan dalam Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026). Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi pelaku usaha sekaligus merumuskan rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam Rapimnas pada 29-30 Oktober mendatang.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, forum tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Rapimnas. Sebelumnya, Kadin telah menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Serentak pada 24 September 2026 bertepatan dengan HUT ke-58 Kadin Indonesia, yang melibatkan 38 provinsi untuk menghimpun masukan dari semua daerah.

Anin sapaan akrabnya menjelaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan dari tingkat daerah hingga Dewan Pertimbangan akan dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori atau kelompok kerja (working group). Pengelompokan ini diharapkan memudahkan Kadin dalam menyusun masukan bagi pemerintah agar dunia usaha dapat berkembang.

"Kadin ini tetap optimistis, tapi juga tentunya waspada. Dengan segala macam tantangan, tapi kita percaya peluang itu ada. Tapi kita juga mesti mengerti bagaimana meningkatkan competitiveness supaya kita bisa keluar dari middle income trap," ujar Anin.

Anin juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan. Menurut Anin, kontribusi dunia usaha tidak hanya diperlukan ketika terjadi bencana, tetapi juga melalui dukungan terhadap akses pasar, permodalan, teknologi, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid mengatakan, forum tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun aspirasi dan merumuskan prioritas dunia usaha untuk dibawa ke Rapimnas Kadin 2026.

Dalam forum tersebut, Arsjad juga menyampaikan Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha Tahun 2026 sebagai edisi kedua yang menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha beserta usulan perbaikannya. Buku putih ini disusun berdasarkan survei aspirasi organisasi yang tergabung dalam ALB Kadin serta pengusaha di tingkat provinsi dari berbagai sektor.

"Sektor manufaktur menjadi kelompok responden terbesar dengan porsi 27,5%, disusul pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 17,6%, serta logistik dan transportasi sebesar 11,8%. Hasil survei kemudian dibahas melalui rapat komisi untuk mendalami berbagai hambatan dan merumuskan rekomendasi perbaikan," katanya.



Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M. memberikan sambutan dalam Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (kiri) memberikan buku 'We Buy From Indonesia' kepada Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, M. Arsjad Rasjid P.M. dalam acara Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Arsjad berharap buku putih tersebut dapat menjadi rujukan bagi penyusunan program kerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus bahan advokasi kepada pemerintah dan lembaga negara. Ia menekankan bahwa rekomendasi yang telah disusun perlu dikawal bersama agar menghasilkan perbaikan nyata bagi pelaku usaha.

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia pun mendorong agar Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha Tahun 2026 dijadikan rujukan dalam advokasi kepada pemerintah.

"Dewan Pertimbangan juga mendorong Dewan Pengurus untuk melibatkan ALB dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan program organisasi," terangnya.

Selain itu, Dewan Pertimbangan meminta Kadin memperluas keanggotaan ALB dengan mendorong lebih banyak organisasi perusahaan, asosiasi gabungan, organisasi pengusaha, serta himpunan dan ikatan untuk bergabung. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat dan mengefektifkan advokasi Kadin kepada pemerintah.

Arsjad juga mengajak para anggota ALB untuk terus menyampaikan aspirasi yang dilengkapi data pendukung sektoral, sekaligus bersama-sama memantau penyelesaian rekomendasi tahun 2025 yang belum tuntas dan pelaksanaan rekomendasi tahun 2026 secara terukur.

"Dengan pembagian peran yang jelas antara Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus dan seluruh ALB Kadin, aspirasi dapat bergerak dari forum diskusi menjadi perubahan kebijakan yang nyata," ujar Arsjad.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe.



Sesi Foto bersama usai acara Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Jelang Rapimnas, Kadin Umumkan Pemenang Lomba Foto UMKM



Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko (kanan) bersama Ketua Komite Tetap Kemitraan Kelembagaan Nasional Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Lomba Foto UMKM HUT Ke-58 Kadin Indonesia, Yuliandre Darwis (kiri) saat memberikan penilaian terhadap karya finalis lomba foto UMKM dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 Kadin Indonesia.

Jakarta - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan jelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026, Kadin Indonesia menggelar Lomba Foto UMKM sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang sejalan dengan tema inti Rapimnas yang diangkat tahun ini, yakni "Ekonomi kerakyatan untuk Indonesia Mendunia: UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas".

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan, ekonomi kerakyatan sangat beririsan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia.

"Kami ingin pengembangan UMKM nasional terus digerakkan, menjadi salah satu agenda prioritas guna mewujudkan visi Indonesia Emas dan juga target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Tentu kami dari dunia usaha sangat antusias atas hal ini dan siap bergerak bersama seluruh pihak, utamanya dengan para pelaku UMKM dan masyarakat memajukan UMKM dan perekonomian," ungkap Taufan.

Taufan menambahkan, saat ini beberapa tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, perluasan pasar, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal.

Di gelaran Rapimnas, lanjut Taufan, dengan semangat Indonesia Incorporated, Kadin Indonesia bersama pemerintah akan membahas secara lebih mendalam untuk mendapatkan solusi terbaik guna mendorong peningkatan kinerja UMKM nasional melalui strategi dan kebijakan yang tepat.

"Kadin akan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan secara formal kepada pemerintah. Kami harap UMKM nasional naik kelas dan semakin berkualitas, juga tercipta pelaku-pelaku ekonomi baru," jelas Taufan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Lomba Foto UMKM HUT Ke-58 Kadin Indonesia, Yuliandre Darwis mengatakan bahwa kegiatan lomba foto UMKM menjadi wujud apresiasi terhadap para pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.

"Kami ingin menampilkan potret UMKM secara nyata, bagaimana mereka berinovasi, memproduksi, hingga berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi," kata Yuliandre yang juga merupakan Ketua Komite Tetap Kemitraan Kelembagaan Nasional Bidang Organisasi Kadin Indonesia.

Melalui kegiatan ini, ungkap Yuliandre, Kadin ingin melibatkan kreativitas anak bangsa, sekaligus membuka ruang partisipasi publik untuk ikut memaknai peran UMKM sebagai pelaku penggerak ekonomi nasional.

Yuliandre menyebutkan, dari 532 karya peserta lomba, telah terpilih 10 finalis terbaik. Lima peserta dengan karya foto UMKM terbaik mendapatkan hadiah senilai Rp10 juta untuk Juara 1, Rp5 juta untuk Juara 2, Rp3 juta untuk Juara 3, Rp2 juta untuk Juara 4, dan Rp1 juta untuk Juara 5. Total 10 karya terbaik mendapatkan e-sertifikat penghargaan.

Berikut adalah daftar lengkap para pemenang Lomba Foto UMKM Kadin Indonesia:

Juara 1: Adhi Wicaksono, Depok, Jawa Barat
Juara 2: Ganjar Mustika, Bandung, Jawa Barat
Juara 3: Gholib, Semarang, Jawa Tengah
Juara 4: Prima Dwi Nanda, Klaten, Jawa Tengah
Juara 5: Erianto, Jayapura, Papua

5 Finalis

- Fajar Hengki Wijaya, Sidoarjo, Jawa Timur
- Jiyanto, Grobogan, Jawa Tengah
- Heru Putranto, Surabaya, Jawa Timur
- Sofyan Efendi, Depok, Jawa Barat
- Joni Manurung, Bandung, Jawa Barat

"Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi, menjadikan momentum perayaan HUT Ke-58 Kadin Indonesia dan Rapimnas Kadin semakin bermakna. Karya yang telah terpilih akan menjadi materi pendukung publikasi Kadin," pungkas Yuliandre.



KABAR LUAR NEGERI

Investasi Baru di Tengah Dinamika Geopolitik Global



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menjadi pembicara dalam diskusi panel B20 Stage at District Pier bertajuk "Trade Shifting Global Markets" yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dan pertemuan peserta B20 USA 2026 Summit di The Wharf, Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Selasa (10/11/2026).

Washington D.C. – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia perlu terus membuka koridor perdagangan dan investasi baru untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global. Diversifikasi mitra dagang, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan kolaborasi investasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya dalam diskusi panel B20 Stage at District Pier bertajuk "Trade Shifting Global Markets", yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dan pertemuan peserta B20 USA 2026 Summit di The Wharf, Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Selasa (10/11/2026).

Anin mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa dan usia median sekitar 30 tahun. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Setiap tahun, kita perlu menciptakan setidaknya 4 hingga 5 juta lapangan kerja. Hal ini karena ada sekitar 4 hingga 5 juta bayi yang lahir setiap tahunnya," ujar Anin yang juga merupakan CEO Bakrie & Brothers.

Anin menjelaskan, Tiongkok saat ini menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral sekitar 160 miliar dolar AS. Sementara itu, AS menjadi mitra dagang terbesar kedua dengan nilai perdagangan sekitar 40 miliar dolar AS. Anin menyebut Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan kedua negara tersebut pada tahun ini.

Hilirisasi Sumber Daya Alam

Menurut Anin, salah satu upaya Indonesia dalam meningkatkan nilai perdagangan adalah melalui hilirisasi sumber daya alam. Anin mencontohkan komoditas nikel yang sebelumnya diekspor dalam bentuk bijih dengan nilai ekspor sekitar 3 miliar dolar AS. Setelah melalui proses pengolahan menjadi baja tahan karat dan material baterai, nilai ekspornya meningkat menjadi sekitar 33 miliar dolar AS.

"Ini baru satu jenis mineral kritis. Kami juga memiliki bauksit, tembaga, dan berbagai komoditas lainnya," jelas Anin.

Meski demikian, Anin menekankan pentingnya diversifikasi koridor perdagangan dan investasi agar Indonesia tidak bergantung pada sejumlah mitra dagang tertentu. Salah satunya melalui penguatan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara.

Anin mencontohkan, Indonesia telah menandatangani Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) pada tahun lalu. Sementara itu, Indonesia dan Uni Eropa juga tengah mempersiapkan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (IEU-CEPA) yang diharapkan dapat terealisasi pada akhir November ini. Menurut Anin, perjanjian perdagangan tersebut penting untuk menciptakan stabilitas dan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan dan investasi lintas negara.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (dua dari kiri) bersama para pembicara dalam diskusi panel B20 Stage at District Pier bertajuk "Trade Shifting Global Markets" di The Wharf, Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Selasa (10/11/2026).

"Kita melihat ini sebagai peluang, tetapi juga sebagai risiko strategis. Sebab, meskipun memiliki sumber daya alam di dalam negeri, kita masih bergantung pada negara lain dalam hal teknologi dan permodalan," kata Anin.

Anin menambahkan, investasi ke Indonesia telah mencapai sekitar 40% dari produk domestik bruto (PDB), atau dua kali lipat rata-rata negara-negara G20. Karena itu, kemampuan Indonesia membangun hubungan baik dengan banyak negara menjadi semakin penting.

Peluang Kerja Sama Investasi Lintas Negara

Lebih lanjut, Anin juga menyoroti peluang kerja sama investasi lintas negara yang semakin terbuka di tengah perubahan geopolitik global. Salah satu contohnya adalah investasi perusahaan Indonesia bersama Sovereign Wealth Fund Indonesia di ladang minyak dan gas di Permian Basin, Texas Barat, AS.

Menurut Anin, investasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk menyeimbangkan hubungan perdagangan Indonesia dan AS, mengingat Indonesia selama ini mencatatkan surplus perdagangan dengan negara tersebut.

"Sepuluh tahun lalu, mungkin tidak pernah terpikir bahwa perusahaan Indonesia akan berinvestasi di Permian Basin, Texas Barat. Namun, sekarang Indonesia, melalui sovereign wealth fund dan kelompok usaha kami, berinvestasi di ladang minyak tersebut karena kami ingin menyeimbangkan perdagangan antara AS dan Indonesia," ungkap Anin.

Anin juga mencontohkan peluang kolaborasi investasi dengan Arab Saudi melalui pengembangan Kawasan atau Desa Haji (Hajj Village) Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai sekitar 100 ribu orang, pengembangan kawasan tersebut dinilai menjadi peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjalin kerja sama, tetapi juga melakukan investasi bersama.

Lebih jauh, Indonesia kata Anin perlu memperkuat ketahanan rantai pasok melalui kolaborasi investasi dengan berbagai mitra internasional. Menurut Anin, Indonesia kini memiliki peluang untuk berinvestasi bersama negara-negara anggota G20, khususnya dalam sektor mineral kritis dan hilirisasi.

"Ketika berbicara tentang ketahanan, kita perlu memastikan rantai pasok yang aman dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan untuk berinvestasi bersama dalam rantai pasok tersebut," ujar Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri B20 USA 2026 Summit di The Wharf, Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Selasa (10/11/2026).

Peran Dunia Usaha dalam Perumusan Kebijakan

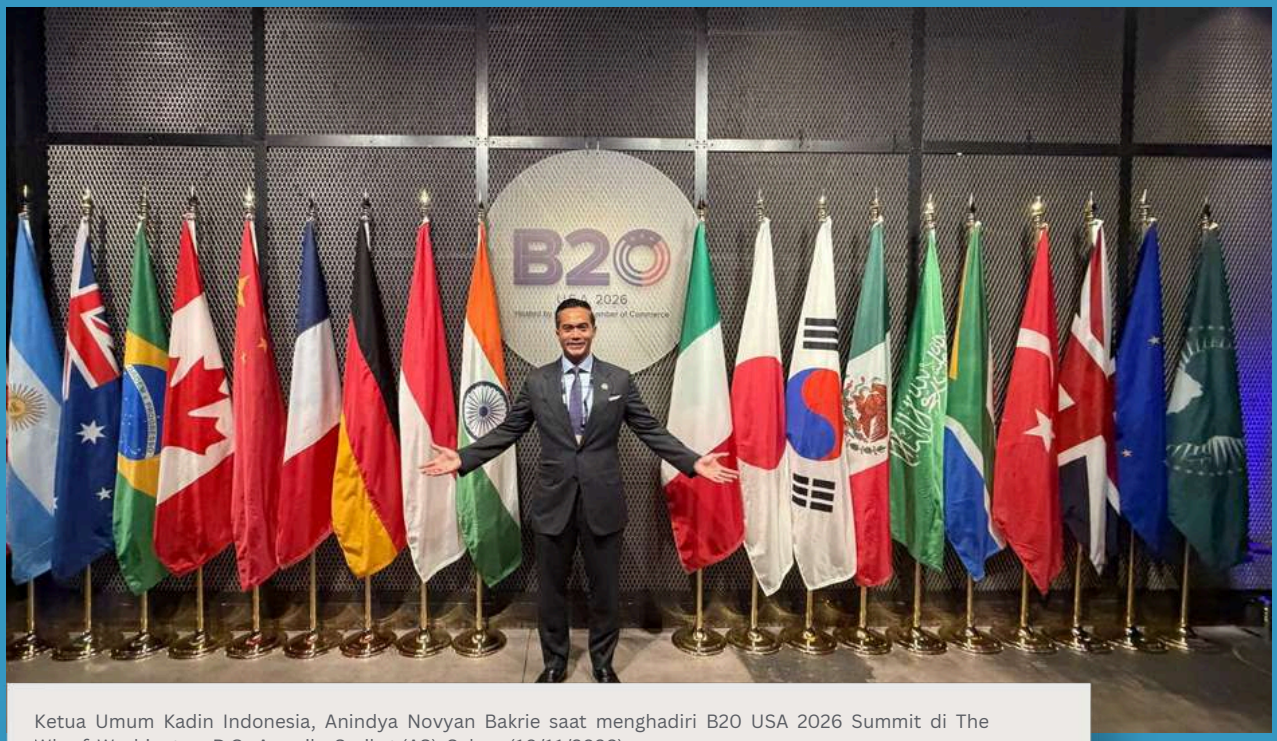
Dalam kesempatan itu, Anin juga mendorong para pemimpin negara untuk melibatkan dunia usaha sejak awal dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi.

"Saya mendorong para pemimpin negara untuk melibatkan dunia usaha sedini mungkin, bukan hanya pada tahap akhir. Pada akhirnya, dalam perdagangan dan investasi, kami adalah pihak yang akan terus bekerja melampaui lima, 10, bahkan 15 tahun ke depan. Kami harus memastikan pabrik tetap beroperasi dan para pekerja tetap menerima gaji," tutur Anin.

Selain itu, Anin mengingatkan pentingnya melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam agenda perdagangan global. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar.

"Jangan lupakan usaha kecil dan menengah. Mereka adalah kekuatan penggerak ekonomi dan tidak akan selamanya menjadi usaha kecil," pungkas Anin.

Hadir juga sebagai narasumber dalam forum tersebut di antaranya President and Chief Executive Officer of the Canadian Chamber of Commerce Candace Laing, Federation of Saudi Chambers of Commerce Sultan Al Musallam, Consejo Coordinator Empresarial Mexico Jose Medina Mora dan Vice President of Middle East Affairs at the U.S. Chamber of Commerce Steve Lutes selaku moderator.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri B20 USA 2026 Summit di The Wharf, Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), Selasa (10/11/2026).



Di Brussel, Kadin Dorong IEU-CEPA Perkuat Kemitraan Ekonomi Indonesia-Uni Eropa

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menyampaikan sambutan di Indonesia-EU Business Forum Networking Lunch di Radisson Collection Hotel, Brussel, Belgia, Jumat (6/11/2026).

Brussel, Belgia – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa melalui peningkatan perdagangan, investasi, kerja sama industri, serta transfer teknologi.

Hal tersebut disampaikan Anindya yang akrab disapa Anin saat memberikan keynote speech dalam acara Indonesia-EU Business Forum Networking Lunch di Radisson Collection Hotel, Brussel, Belgia, Jumat (6/11/2026) waktu setempat.

Dikatakan Anin, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) harus mampu menghadirkan peluang bisnis yang konkret bagi dunia usaha kedua pihak.

"Indonesia dan Eropa memiliki hubungan panjang yang dibangun melalui perdagangan, investasi, dan kerja sama di berbagai sektor. Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama (Partnership and Cooperation Agreement) yang berlaku sejak 2014 telah menjadi landasan penting bagi hubungan tersebut," ujar Anin.

Anin menyebutkan, Uni Eropa merupakan salah satu mitra utama perdagangan dan investasi Indonesia. Nilai perdagangan barang bilateral kedua pihak mencapai sekitar 29 miliar euro pada 2025.

Menurut Anin, penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan Eropa menjadi semakin penting di tengah perubahan ekonomi global, termasuk meningkatnya ketidakpastian perdagangan, rantai pasok, ketahanan energi, dan investasi. Kedua pihak memiliki peluang untuk memanfaatkan kekuatan yang saling melengkapi guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Anin menilai, IEU-CEPA menjadi salah satu tonggak penting dalam babak baru hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Setelah melalui hampir satu dekade perundingan, kedua pihak menyelesaikan negosiasi pada September 2025 sebagai langkah menuju penandatanganan dan implementasi perjanjian tersebut.

Namun, Anin menegaskan bahwa manfaat CEPA tidak boleh berhenti pada kesepakatan di atas kertas. Penurunan tarif diharapkan dapat meningkatkan akses produk Indonesia ke pasar Eropa sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi perusahaan Eropa untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Indonesia.

"Di luar perdagangan, CEPA dapat mendorong investasi, transfer teknologi, penguatan kemitraan industri, serta integrasi rantai pasok yang lebih erat. Ukuran keberhasilannya adalah berkembangnya dunia usaha, terealisasinya investasi, dan terciptanya lapangan kerja bersama," kata Anin.

Lebih lanjut, Anin menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha Eropa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN, didukung pasar domestik yang terus berkembang, kapasitas industri yang meningkat, serta sumber daya alam yang melimpah.

"Indonesia juga dapat menjadi pintu masuk bagi perusahaan Eropa untuk menjangkau pasar kawasan ASEAN yang lebih luas," tutur Anin.

Dalam kesempatan tersebut, Anin mengidentifikasi tiga bidang utama yang dapat dikembangkan melalui kerja sama dunia usaha Indonesia dan Eropa.

Pertama, perdagangan dan kerja sama industri melalui penguatan hubungan antara produsen Indonesia dan pembeli Eropa, serta pengembangan manufaktur bersama, transfer teknologi, dan peningkatan produksi bernilai tambah.

Kedua, investasi dan infrastruktur. Menurutnya, modal, kemampuan rekayasa, serta keahlian industri Eropa dapat melengkapi kebutuhan Indonesia yang terus meningkat terhadap pembangunan infrastruktur, logistik, konektivitas digital, dan pengembangan industri.

Ketiga, energi bersih dan mobilitas berkelanjutan. Transisi energi Indonesia dinilai membuka peluang besar di sektor energi terbarukan, jaringan kelistrikan, dan elektrifikasi.

"Dalam hal ini, Eropa memiliki potensi untuk berkontribusi melalui pengembangan teknologi dan pembiayaan," ujar Anin.

Anin mencontohkan pengembangan kendaraan komersial listrik melalui VKTR, bagian dari Bakrie Group, termasuk bus listrik yang digunakan untuk mendukung sistem transportasi publik Jakarta, yakni TransJakarta.

"Ini merupakan salah satu contoh bagaimana pengembangan industri dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan, menciptakan peluang bagi kota yang lebih bersih, manufaktur yang lebih kuat, serta kemitraan baru," jelas Anin.

Anin berharap kerja sama serupa dapat semakin berkembang di antara perusahaan Indonesia dan Eropa dengan menggabungkan investasi, teknologi, dan kekuatan industri lokal.

Lebih jauh, Anin juga menegaskan komitmen Kadin Indonesia untuk menerjemahkan momentum penguatan hubungan bilateral tersebut menjadi peluang bisnis nyata. Sebagai wadah dunia usaha tertinggi yang diamanatkan undang-undang, Kadin mewakili sektor swasta sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.

Melalui konsep Indonesia Incorporated, Kadin berupaya mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga investasi untuk mendorong prioritas ekonomi nasional.

Dalam upaya tersebut, Danantara juga menjadi salah satu mitra penting, baik di dalam negeri maupun dalam menjalin kerja sama internasional.

Kadin juga terus memperkuat hubungan dengan berbagai mitra di Eropa.

"Pada tahun lalu, Kadin telah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Brussel, termasuk melalui dialog bersama Benelux-Indonesia Association," kata Anin.

Ke depan, Kadin berharap hubungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui lebih banyak delegasi bisnis, dialog sektoral, serta kemitraan langsung ant perusahaan dari kedua pihak. Dengan IEU-CEPA yang memasuki tahap menuju penandatanganan dan implementasi, dunia usaha perlu mempersiapkan diri untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

"Indonesia dan Eropa memiliki banyak hal yang dapat diperoleh dari kemitraan yang lebih erat. CEPA dapat membuka pintu, tetapi dunia usahalah yang harus melangkah masuk ke dalamnya. Mari jadikan babak baru ini sebagai momentum untuk mewujudkan kerja sama konkret dan kesejahteraan bersama," pungkas Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (dua dari kanan) saat menyampaikan sambutan di Indonesia-EU Business Forum Networking Lunch di Radisson Collection Hotel, Brussel, Belgia, Jumat (6/11/2026).

Kadin Ajak Rusia Perluas Pembelian Produk Indonesia Lewat Indonesia-Russia Business Forum



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan paparan dalam acara Indonesia-Russia Business Forum di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Indonesia-Russia Business Forum bertajuk "Made in Indonesia: Doubling Trade and Investment between Indonesia and Russia" di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama industri.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, forum tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia yang saat ini bernilai sekitar 300 miliar dolar AS, sekaligus memperluas pasar bagi produk nasional. Menurut Anin sapaan akrabnya, peningkatan ekspor akan turut memperbesar penerimaan devisa negara.

Anindya atau Anin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Rusia saat ini mencapai sekitar 5 miliar dolar AS. Namun, Indonesia masih mengalami defisit perdagangan sekitar 1 miliar dolar AS sehingga perlu meningkatkan ekspor ke Rusia.

"Karena itu, saya juga mempromosikan buku We Buy From Indonesia yang tentunya membantu kita mempromosikan dan menjual lebih banyak barang. Produk yang sudah dibeli oleh luar negeri dan tercantum dalam buku We Buy From Indonesia bukan hanya barang konsumsi," ujar Anin.

Ia menambahkan, Indonesia perlu memperluas peluang agar Rusia semakin banyak membeli produk Indonesia. Di sisi lain, kerja sama kedua negara juga dapat dikembangkan melalui investasi dan pemanfaatan teknologi Rusia di Indonesia.

"Tapi intinya bagaimana Rusia itu bisa juga buy from Indonesia. But first, we make in Indonesia dengan teknologi dan investasi Rusia. Jadi saya rasa itu menarik sekali," kata Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James T. Riady mengatakan, kawasan Pasifik akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dalam satu abad mendatang. Menurutnya, pusat perhatian ekonomi dunia tidak lagi hanya berada di kawasan Atlantik, tetapi semakin bergeser ke Pasifik, dengan Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting.

James menilai Indonesia memiliki posisi strategis berkat letak geografis, sumber daya manusia, kekayaan alam, dan besarnya pasar domestik. Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersahabat dengan semua pihak sekaligus memainkan peran penting di kawasan Pasifik, khususnya Asia.

Karena itu, James mendorong perusahaan-perusahaan Rusia untuk mulai berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari strategi pertumbuhan bisnis mereka.



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady memberikan sambutan dalam Indonesia-Russia Business Forum bertajuk "Made in Indonesia: Doubling Trade and Investment between Indonesia and Russia" di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

"Perusahaan-perusahaan Rusia akan lebih diuntungkan jika mulai berinvestasi di Indonesia. Bawalah perusahaan-perusahaan Rusia dan mulailah berinvestasi di Indonesia. Inilah tempat bagi pertumbuhan bisnis Anda, inilah tempat Anda, dan kami siap menyambutnya," kata James.

Ia menambahkan, peningkatan ekspor Indonesia ke Rusia perlu diimbangi dengan masuknya investasi, pembangunan pabrik, serta transfer teknologi dan keahlian dari Rusia ke Indonesia.

"Kita bisa mengekspor banyak produk ke sana, tetapi kita membutuhkan pabrik-pabrik Rusia, teknologi Rusia, dan keahlian Rusia untuk berinvestasi di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam mengatakan, forum tersebut berlangsung pada momentum penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia. Ia merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Eastern Economic Forum di Vladivostok, Rusia, pada 3 September 2026, yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan tantangan untuk menggandakan nilai perdagangan Indonesia-Rusia dalam periode evaluasi pertama selama lima tahun. Didit menilai target tersebut ambisius, tetapi realistis untuk dicapai.

"Kami meyakini target ini ambisius, tetapi realistis dan dapat kita capai," ujar Didit.

Didit menjelaskan, forum tersebut mempertemukan pemimpin pemerintah dan pelaku usaha dari kedua negara yang ingin menjajaki pasar, mencari mitra bisnis, mengembangkan peluang investasi, dan merealisasikan berbagai proyek kerja sama.

Sejumlah sektor yang terlibat mencakup pelayaran dan pembuatan kapal, keuangan, perdagangan, logistik, pertanian, dan industri. Perwakilan Danantara juga hadir untuk mendukung pembahasan peluang kerja sama investasi. Menurut Didit, tantangan utama dalam forum ini adalah mempertemukan kepentingan berbagai pihak agar peluang yang tersedia dapat diwujudkan menjadi kerja sama bisnis yang konkret.

"Tugas kita hari ini adalah mempertemukan berbagai kepentingan tersebut dan mengubah peluang menjadi kerja sama bisnis yang nyata. Inilah yang kami maksud dengan penjodohan bisnis (business matching)," tuturnya.
Turut hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati dan WKU Bidang Perlindungan Pekerja Migran Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi.

KABAR PROGRAM

Anindya Bakrie Temui Menko Yusril, Konsultasi Revisi UU Kadin



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (lima dari kanan) dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra (empat dari kiri) berfoto bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia usai audiensi di Kantor Kemenko Bidang Kumham Imipas RI di Trinity Tower, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kemenko Bidang Kumham Imipas RI di Trinity Tower, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Anindya atau Anin sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Kadin Indonesia berkonsultasi dengan Menko Yusril terkait revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang telah berlaku selama 39 tahun.

"Kami datang dari jajaran Kadin untuk melaporkan dan juga berkonsultasi kepada beliau selaku Menko dan juga senior dari bidang hukum tata negara, mengingat Kadin sedang merevisi undang-undangnya yang sudah 39 tahun, tahun 1987," ujar Anin.

Anin menjelaskan, Kadin Indonesia merupakan wadah dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah. Oleh karena itu, pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan peran Kadin dengan perkembangan zaman, termasuk reformasi dan digitalisasi.

"Beliau (Menko Yusril) sangat mengerti dan memahami (Kadin) juga mitra strategis pemerintah. Di sinilah kami melakukan pembaruan karena era juga sudah berubah, reformasi, digitalisasi, dan lain-lain," kata Anin.



Jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kemenko Bidang Kumham Imipas RI di Trinity Tower, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Anin menambahkan, dunia usaha membutuhkan dorongan agar dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung program pemerintah, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 7–8 persen. Konsultasi dengan Menko Yusril lanjut Anin dilakukan untuk memperoleh masukan dari perspektif hukum, mengingat proses pembaruan undang-undang harus berjalan dalam koridor negara hukum.

"Karena sekarang sudah selesai di parlemen sebagai inisiatif tapi sekarang sedang DIM atau daftar interferasi masalah dengan pemerintah," kata Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berjabat tangan dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra saat audiensi di Kantor Kemenko Bidang Kumham Imipas RI di Trinity Tower, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Sementara itu Menko Yusril menyambut baik inisiatif pembaruan UU Kadin. Yusril menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang dalam proses menyusun DIM, dan Presiden kelak akan menunjuk jajaran menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Kadin bersama DPR.

Yusril menilai keselarasan antara pemerintah dan Kadin sangat krusial demi menciptakan iklim dunia usaha yang solid dan tangguh. Sinergi ini juga menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah sangat memerlukan keberadaan Kadin yang solid dan kuat. Dunia usaha tidak mungkin berkembang tanpa negara, dan sebaliknya. Apa yang dibutuhkan Kadin harus didukung pemerintah agar program-programnya sejalan dengan target jangka pendek, menengah, maupun panjang," kata Menko Yusril.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengungkapkan bahwa kerja sama yang erat ini menjadi fondasi penting mengingat Indonesia tengah berproses masuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Jika proses integrasi selesai, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang bergabung dengan OECD setelah Jepang dan Korea Selatan, yang menandai masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara maju. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang hukum, pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta pemberantasan korupsi dan penyuapan.

"Dan saya berharap memang ini kerja sama yang erat antara pemerintah dan Kadin ini, mudah-mudahan ya kita betul-betul jadi negara ketiga di Asia menjadi anggota OECD, masuk dalam kelompok negara maju ya," tutur Menko Yusril.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang BUMN Kadin Indonesia Rico Rustombi dan Kepala Badan Hubungan Legislatif Kadin Indonesia Adisatrya Sulisto.



Kadin Usulkan Kolaborasi dengan ITPC untuk Perluas Promosi Produk Indonesia

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama Menteri Perdagangan RI Budi Santoso usai melakukan audiesi di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong peningkatan ekspor nasional melalui penguatan kerja sama perdagangan dan perluasan akses pasar global. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan devisa sekaligus membuka peluang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar internasional.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Anin menjelaskan, Kadin berfokus pada upaya meningkatkan ekspor Indonesia. Menurut Anin, peningkatan ekspor dapat memberikan kontribusi langsung terhadap devisa negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena kita tahu kita ekspor sekitar 300 miliar dolar AS dan setiap 5 persen, 10 persen tumbuh itu bisa membawa langsung devisa buat Indonesia," kata Anin.

Anin mengatakan, Kadin ingin memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendorong perdagangan sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan ekspor. Menurut Anin, pengembangan ekspor perlu melibatkan UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok perdagangan internasional.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia usai beraudiensi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Anin mencontohkan, sejumlah produk usaha dalam negeri telah berhasil menembus pasar luar negeri. Salah satunya produk dari kelompok usaha di Palembang yang mampu mencatat penjualan cukup besar ke Belanda. Selain itu, produk kopi yang dipasarkan melalui Trade Expo Indonesia (TEI) juga berhasil menjangkau pasar Amerika Serikat.

Anin juga menyebut penyelenggaraan TEI 2026 mencatatkan potensi transaksi senilai 22,8 miliar dolar AS dalam waktu satu minggu. Capaian tersebut menjadi salah satu peluang untuk terus memperluas jangkauan perdagangan produk Indonesia.

"Kita tetap fokus bagaimana meningkatkan perdagangan, karena dengan perdagangan yang kuat, pastilah investasi datang, dan juga industrialisasi bisa terjaga," terang Anin.

Lebih lanjut, Kadin mendorong pemanfaatan jaringan promosi perdagangan Indonesia di luar negeri melalui Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Anin menilai, kerja sama dengan ITPC dapat membantu memperkenalkan lebih banyak produk nasional kepada calon pembeli internasional.

Menurut Anin, promosi ekspor perlu melibatkan langsung pelaku usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemerintah berperan mendukung akses dan kerja sama perdagangan, sementara pelaku usaha menjadi pihak yang menjalankan transaksi ekspor.

Anin menambahkan, Kadin juga mendorong optimalisasi kerja sama perdagangan yang sudah berjalan maupun yang masih dikembangkan, termasuk dengan pasar Uni Eropa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas peluang ekspor Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

"Jadi kalau misalnya Kadin bisa bekerja sama di ITPC itu, kita bisa mempromosikan lebih banyak lagi langsung dari suara dunia usaha atau pelakunya," papar Anin.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang BUMN Kadin Indonesia Rico Rustombi dan Kepala Badan Hubungan Legislatif Kadin Indonesia Adisatrya Sulisto.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie didampingi Kepala Badan Hubungan Legislatif Kadin Indonesia Adisatrya Sulisto (kiri), Wakil Ketua Umum Bidang BUMN Kadin Indonesia, Rico Rustombi (dua dari kanan) dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, M. Azis Syamsuddin (kanan) memberikan keterangan pers usai audiensi dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).



Kadin Imbau MSCI Lebih Objektif dalam Menilai Pasar Modal Indonesia

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengimbau MSCI untuk menilai pasar modal Indonesia secara objektif, transparan, dan proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan kondisi pasar serta kemajuan reformasi yang tengah dilaksanakan. Usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market memiliki konsekuensi besar terhadap kepercayaan investor, pembiayaan dunia usaha, dan kepentingan pemegang saham publik.

Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa Kadin menghormati independensi MSCI sebagai penyedia indeks global. Namun, independensi tersebut perlu disertai keterbukaan mengenai dasar penilaian, konsistensi proses evaluasi, serta pengakuan yang adil terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

"Kami menghormati MSCI sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting dalam ekosistem investasi global. Pada saat yang sama, kami mengimbau agar penilaian terhadap Indonesia dilakukan secara menyeluruh, berbasis bukti, dan proporsional. Kekurangan harus diperbaiki, tetapi kemajuan yang sudah dicapai juga harus memperoleh penilaian yang adil," ujar Anin.

Kadin menyoroti waktu pembukaan konsultasi reklasifikasi pada 15 Oktober 2026 waktu New York atau 16 Oktober 2026 waktu Indonesia. Sebelumnya, MSCI menyampaikan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat sampai peninjauan indeks November 2026, lembaga tersebut akan mempertimbangkan pembukaan konsultasi perubahan klasifikasi Indonesia. Dengan demikian, pembukaan konsultasi pada pertengahan Oktober memerlukan penjelasan mengenai pertimbangan dan bukti yang mendasarinya.

"Publik dan pelaku usaha berhak memperoleh penjelasan: mengapa konsultasi reklasifikasi dibuka sebelum tenggat evaluasi November yang sebelumnya menjadi acuan? Temuan baru apa yang mendasari langkah tersebut, dan bagaimana kemajuan reformasi Indonesia diperhitungkan? Kejelasan ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap objektivitas proses penilaian," kata Anin.

Kadin memahami bahwa peninjauan indeks reguler dan konsultasi klasifikasi pasar merupakan proses yang berbeda. Karena itu, persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata perbedaan jadwal, melainkan konsistensi antara komunikasi sebelumnya, kesempatan untuk menunjukkan hasil reformasi, dan dasar pembukaan konsultasi lebih awal.

Meski belum menjadi keputusan final, usulan perubahan status tersebut merupakan ancaman serius terhadap pasar modal Indonesia. Status Standalone Market akan menempatkan Indonesia di luar kelompok indeks pasar berkembang MSCI apabila usulan itu diterapkan. Konsekuensinya dapat berupa penyesuaian portofolio investor global, berkurangnya basis investor, serta meningkatnya tekanan terhadap valuasi saham dan akses pembiayaan perusahaan.

Tekanan pasar sudah terlihat pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026. Di tengah kekhawatiran terhadap usulan MSCI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 11,57% ke level 5.185,10. Pergerakan tersebut menunjukkan besarnya sensitivitas pasar terhadap komunikasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi.

"Dampaknya menyentuh perusahaan yang membutuhkan modal untuk berekspansi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi. Jutaan investor serta pemegang saham publik juga berkepentingan atas pasar yang sehat dan penilaian yang berimbang. Karena itu, komunikasi yang berpotensi menimbulkan guncangan besar harus disertai dasar yang jelas," ujar Anin.

Menurut Kadin, perubahan Indonesia menjadi Standalone Market merupakan langkah yang tidak proporsional apabila tidak mempertimbangkan secara utuh jumlah dan keragaman serta kualitas emiten, kapitalisasi pasar, frekuensi serta nilai transaksi, infrastruktur pasar, dan kemajuan tata kelola. Besarnya pasar Indonesia dan perannya dalam pembiayaan perekonomian perlu menjadi bagian dari evaluasi yang menyeluruh.

Pada saat yang sama, Kadin menyadari bahwa ukuran pasar bukan satu-satunya ukuran kelayakan investasi. Transparansi kepemilikan, kualitas saham yang benar-benar tersedia bagi publik atau free float, aksesibilitas bagi investor, dan integritas pembentukan harga tetap menjadi persyaratan penting. Karena itu, pembelaan terhadap pasar modal Indonesia harus berjalan bersama pembenahan yang dapat dibuktikan.

"Kami berpandangan bahwa pasar modal Indonesia layak dipertahankan dalam kategori Emerging Market. Persoalan pada saham atau pihak tertentu harus ditangani secara tegas dan terukur. Penilaian terhadap keseluruhan pasar juga harus memperhitungkan kondisi emiten yang menjalankan usaha secara sehat dan memenuhi kewajiban tata kelola," tegas Anin.

Kadin mendukung pelaksanaan Delapan Program Reformasi Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), organisasi regulator mandiri atau SRO, serta pelaku industri. Agenda tersebut meliputi peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dengan ketentuan transisi bagi emiten eksisting; penguatan transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO); serta peningkatan kualitas dan perincian data kepemilikan saham.

Program lainnya mencakup persiapan demutualisasi bursa efek untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi benturan kepentingan; penegakan peraturan dan sanksi secara konsisten; peningkatan tata kelola emiten; pendalaman pasar secara terintegrasi; serta penguatan kolaborasi pemerintah, otoritas, SRO, dan pelaku industri.

Langkah yang telah dilaporkan OJK, antara lain publikasi kepemilikan saham di atas 1%, perincian klasifikasi investor, pengumuman konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, serta kebijakan peningkatan batas minimum free float, merupakan kemajuan konkret yang perlu diperhitungkan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus diikuti pengujian atas efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan kewajaran transaksi.

"Reformasi sudah berjalan dan menghasilkan langkah nyata. Kami meminta MSCI memberikan penilaian yang adil terhadap kemajuan tersebut, sekaligus menjelaskan secara spesifik bagian mana yang belum memenuhi standar dan bukti perbaikan seperti apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, proses konsultasi menghasilkan arah pembenahan yang jelas," kata Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat memberikan keterangan pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terlepas dari keberatan terhadap usulan MSCI, Kadin menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi cambuk bagi OJK, SRO, pemerintah, pelaku pasar modal, dan emiten untuk mempercepat pembenahan. Penegakan hukum terhadap manipulasi transaksi, penyamaran kepemilikan, dan penyampaian informasi menyesatkan harus dilakukan secara konsisten, transparan, serta memberikan efek jera.

Kadin juga mendorong emiten meningkatkan keterbukaan hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir, memastikan kualitas free float, serta menjaga perlakuan yang adil terhadap pemegang saham publik. Pemerintah dan otoritas perlu memperkuat kepastian kebijakan serta menyampaikan hasil reformasi secara terukur kepada investor domestik dan internasional.

"Kita harus menjadikan penilaian MSCI sebagai cambuk untuk berbenah. Kritik dari luar perlu dijawab dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat diverifikasi. Melindungi investor publik, menegakkan aturan, serta membangun pasar yang transparan merupakan kepentingan Indonesia sendiri," ujar Anin.

Kadin Indonesia siap mendukung dialog konstruktif antara dunia usaha, otoritas pasar modal, MSCI, dan investor global. Dialog tersebut perlu diarahkan pada penyamaan pemahaman mengenai kondisi pasar, indikator keberhasilan reformasi, dan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan.

"Kami meminta MSCI objektif dan proporsional. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Indonesia bekerja lebih keras. Kepercayaan harus kita bangun melalui pasar modal yang transparan, adil, berintegritas, dan mampu membiayai pertumbuhan ekonomi," tutup Anin.

Kadin Indonesia Tekankan Pentingnya Uji Tuntas HAM untuk Perkuat Daya Saing Usaha



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (dua dari kanan) dan Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai (tiga dari kiri) dalam acara pembukaan Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2026 di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam dunia usaha untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya dalam Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2026 bertema "Kementerian HAM Mewujudkan Bisnis Bermartabat, Ekonomi Berdaulat Menyongsong Indonesia Emas 2045" di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Anin mengatakan, ekonomi kerakyatan perlu didorong agar mampu membawa produk dan jasa unggulan Indonesia menembus pasar global sekaligus menarik investasi ke dalam negeri. Menurut Anin, upaya tersebut dapat diperkuat melalui dua narasi, yakni We Buy from Indonesia untuk mendorong dunia membeli produk dan jasa Indonesia, serta We Buy Indonesia untuk mengajak investor menanamkan modalnya pada berbagai usaha di Tanah Air.

Anin menjelaskan, upaya Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga bertujuan meningkatkan kepercayaan pembeli dan investor global. Dalam proses tersebut, Kadin turut berperan mewakili kepentingan dunia usaha, termasuk dalam mendorong penerapan prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap HAM.

"Di sinilah HAM menjadi kunci. Uji Tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence disiapkan sebagai salah satu prasyarat anggota OECD," ujar Anin.

Anin kemudian memaparkan tiga prinsip yang perlu menjadi perhatian dunia usaha, yakni challenges (tantangan), competition (persaingan), dan compassion (kepedulian).

Dari aspek tantangan, Anin menyoroti pentingnya pemenuhan standar global seiring proses aksesi Indonesia menuju OECD yang memasuki tahap technical review terhadap 26 komite teknis. Salah satu cakupannya adalah responsible business conduct, termasuk penerapan Uji Tuntas HAM.



Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai dalam acara pembukaan Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2026 di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Di tingkat nasional, Kementerian HAM RI juga tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden yang mewajibkan penerapan Uji Tuntas HAM bagi perusahaan dengan jumlah pekerja 2.000 orang atau lebih maupun perusahaan berisiko tinggi. Kebijakan tersebut mencakup penilaian risiko bisnis dan HAM serta direncanakan diterapkan secara bertahap menuju 2028.

Menurut Anin, kepatuhan terhadap prinsip HAM tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai beban bagi perusahaan, melainkan menjadi bagian penting dalam memenuhi persyaratan akses pasar dan menarik investasi.

"Karena itu, kepatuhan HAM menurut kami bukan lagi sekadar beban atau pilihan negatif, melainkan syarat akses pasar dan tiket utama investasi," kata Anin.

Anin menilai, penerapan prinsip tersebut juga relevan dengan upaya Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle-income trap*) sebelum mencapai visi Indonesia Emas 2045. Anin menambahkan, Uji Tuntas HAM merupakan bagian dari disiplin manajemen risiko perusahaan melalui proses identifikasi, pencegahan, mitigasi, pemulihan, dan pemantauan dampak kegiatan usaha terhadap manusia.

"Perusahaan yang disiplin itu lebih dipercaya. Dan investor global tentu akan mencari yang dapat dipercaya. Dan itulah tiket daya saing kita," ujar Anin.

Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan, forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun dunia usaha yang bermartabat dan berlandaskan prinsip-prinsip HAM.

Ia menegaskan, penghormatan terhadap HAM perlu menjadi prinsip umum dalam pengelolaan bisnis, sebagaimana telah diterapkan sebagai standar di berbagai kawasan dunia.

"Dunia bisnis yang dijiwai, disemangati HAM. Dan itu menjadi prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan dunia bisnis di seluruh dunia. Uni Eropa, di Amerika (Serikat), di Afrika, semua namanya standar pengelolaan bisnis berbasis hak asasi manusia sudah menjadi standar resmi," terangnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan sambutan dalam Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2026 di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Anindya Bakrie Soroti Daya Saing dan Kesenjangan Talenta di Indonesia dalam ITC Leadership Conclave 2026

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyoroti daya saing nasional dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja sebagai dua tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat daya tarik investasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat memberikan sambutan dalam International Test Center (ITC) Leadership Conclave 2026 bertajuk "Durable Leadership, Lasting Impact: Optimizing the Integration of Resources, New Technologies and Adaptive Human Skills" di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Menurut Anin, pertumbuhan investasi perlu diiringi dengan peningkatan daya saing dan kenyamanan berusaha agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investor. Anin memperkirakan investasi nasional masih akan tumbuh, dengan target mencapai Rp2.000 triliun pada 2026 dan Rp2.300 triliun pada 2027. Namun, pertumbuhan investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI) perlu diimbangi dengan penguatan daya saing Indonesia.

"Kalau dari sisi FDI, masih dalam takaran tumbuh. Mungkin tahun ini Rp2.000 triliun, tahun depan Rp2.300 triliun. Nah, kalau menurut saya salah satu alasannya ialah competitiveness," ujar Anin.

Anin menilai, pelaku usaha perlu mengevaluasi kemampuan perusahaan di Indonesia untuk bersaing dengan kompetitor di negara lain. Selain daya saing, kenyamanan dalam menjalankan bisnis dan menjalin kemitraan juga menjadi pertimbangan investor dalam menentukan lokasi investasi.

"Ujung-ujungnya, are we more competitive than the next guy? Dan yang kedua, is it more comfortable to do business here atau tempat lain?" terang Anin.

Lebih lanjut, Anin menjelaskan bahwa peningkatan daya saing tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Dia mengakui pelaku usaha di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan transfer ke daerah (TKD) yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan inovasi.

Kendati demikian, Anin mendorong dunia usaha untuk berfokus pada faktor-faktor yang dapat dikendalikan secara langsung guna meningkatkan daya saing. Sementara itu, berbagai persoalan kebijakan tetap perlu diperjuangkan melalui advokasi agar tercipta iklim usaha yang lebih kondusif.

"Daya saing menurut saya itu sesuatu yang kita bisa kontrol," tegas Anin.

Selain daya saing, Anin menyoroti kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja industri dan ketersediaan talenta dengan kompetensi yang sesuai. Anin menyebut, sekitar 4 juta hingga 5 juta pencari kerja setiap tahun masih mencari pekerjaan, sementara perusahaan yang ingin berkembang terus membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan.



Ketua Umum Kadin Indonesia Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (kanan) menerima cinderamata dari Chief Executive Officer International Test Center Jenny Lee (kiri) usai memberikan sambutan dalam International Test Center (ITC) Leadership Conclave 2026.



(Dari kiri) Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Chief Executive Officer International Test Center Jenny Lee dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama usai memberikan keterangan pers di acara International Test Center (ITC) Leadership Conclave 2026 bertajuk "Durable Leadership, Lasting Impact: Optimizing the Integration of Resources, New Technologies and Adaptive Human Skills" di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026)

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan keterampilan yang dimiliki para pencari kerja. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih erat antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk memastikan pendidikan serta pengembangan keterampilan selaras dengan kebutuhan industri.

Anin menegaskan, dunia usaha perlu dilibatkan dalam proses tersebut karena perusahaan merupakan pengguna langsung talenta yang dihasilkan oleh institusi pendidikan.

"Berarti ada disconnect antara apa yang dibutuhkan dan juga apa yang tersedia. Nah, ini juga satu hal yang saya rasa sangat penting disiasati. Dan ini juga saya tahu dari BRIN misalnya, perguruan tinggi, ya harus bicara dengan dunia usaha karena kita adalah penggunanya," ucap Anin.

Sementara itu, Chief Executive Officer ITC Jenny Lee menekankan pentingnya kolaborasi di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Menurut dia, seluruh sumber daya yang ada perlu dioptimalkan untuk menghadapi situasi tersebut.

"Pesannya yang pasti hari ini kita mesti kolaborasi semuanya. Karena situasi dunia yang tidak terlalu baik dan banyak tantangannya. Tentu kita perlu mengoptimalkan semua resources yang ada ya," ujar Jenny.

Lebih jauh, Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa pemanfaatan AI seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai pengganti tenaga manusia.

"Teknologi perlu digunakan untuk membantu pekerjaan, sementara kemampuan manusia dalam menentukan arah, mempertimbangkan nilai kemanusiaan, dan mengambil keputusan tetap menjadi bagian penting," kata Ahok.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyampaikan pemaparan materi dalam International Test Center (ITC) Leadership Conclave 2026 bertajuk "Durable Leadership, Lasting Impact: Optimizing the Integration of Resources, New Technologies and Adaptive Human Skills" di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

67% Pelaku UMKM Perempuan, Ketum Kadin Dorong Ekspansi ke Pasar Global

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan pentingnya peran perempuan dalam memperkuat perekonomian nasional. Perempuan dinilai memiliki kontribusi besar terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya dalam acara The 4th Asian Women Entrepreneurs Conference & International Women in Business and Investment Summit yang digelar oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersama Asian Women Entrepreneurs Congress di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2026).

Anin mengatakan, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dengan keterlibatan perempuan yang signifikan. Anin menyebut, sekitar 67% pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan.

"97% dari ekonomi Indonesia itu datang dari Small and Medium Enterprises atau UMKM. Dari 97% itu, 67% di data kami adalah perempuan," ujar Anin.

Menurut Anin, kontribusi perempuan juga tercermin dalam akses pembiayaan perbankan. Anin menyampaikan bahwa perempuan dinilai memiliki rekam jejak pembayaran pinjaman yang baik sehingga menjadi kelompok debitur yang diminati oleh perbankan.

Anin menambahkan, besarnya peran perempuan dalam perekonomian perlu diikuti dengan upaya memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing, serta memperkuat akses ke pasar internasional.

Untuk itu, Anin menekankan tiga hal yang perlu diperkuat, yakni connect, collaborate, dan co-create. Ketiganya menjadi landasan untuk membangun konektivitas, memperluas kolaborasi, serta menciptakan peluang baru bagi pengusaha perempuan.

Dalam aspek konektivitas, Anin menilai Indonesia memiliki posisi strategis melalui keanggotaannya di ASEAN dan BRICS serta kemitraan dengan berbagai negara. Posisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan geopolitik dan perubahan iklim yang turut memengaruhi ketahanan perekonomian.

"Kita mempunyai tantangan untuk menavigasi geopolitik dan perubahan iklim agar perekonomian kita tetap tangguh," kata Anin.

Sementara itu, dalam aspek kolaborasi, Kadin terus mendorong diplomasi ekonomi melalui berbagai forum internasional, termasuk ASEAN, APEC, BRICS, dan G20. Menurut Anin, kerja sama antar-pelaku usaha dan negara berkembang perlu diperkuat untuk menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih luas.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kiri) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Fauzi (empat dari kiri) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IWAPI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi (tiga dari kanan) berfoto bersama usai acara The 4th Asian Women Entrepreneurs Conference & International Women in Business and Investment Summit yang digelar oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersama Asian Women Entrepreneurs Congress di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2026).



Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IWAPI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia, Nita Yudi memberikan sambutan dalam The 4th Asian Women Entrepreneurs Conference & International Women in Business and Investment Summit yang digelar oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersama Asian Women Entrepreneurs Congress di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2026).

Anin menilai, kolaborasi antar-negara berkembang atau South-South Cooperation menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap potensi ekonomi kawasan Asia-Pasifik dan Afrika.

"Kenapa tidak yang bertumbuh berbicara dengan yang bertumbuh, apalagi yang sedang berkembang, dan bukan saja diarahkan dari negara-negara yang sudah maju," ujar Anin.

Dalam mendukung pengusaha perempuan agar mampu menembus pasar global, Kadin juga memiliki Kadin Export Academy. Program ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam mengembangkan ekspor, termasuk produk-produk yang banyak dihasilkan oleh UMKM.

Anin menyebut, nilai ekspor Indonesia mencapai sekitar 300 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 miliar dolar AS berasal dari komoditas utama, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan baja tahan karat. Sementara itu, produk lainnya mencakup tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik yang juga membuka peluang bagi pelaku UMKM.

Menurut Anin, penguatan kapasitas ekspor menjadi penting agar pengusaha perempuan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Anin menegaskan, upaya memperkuat konektivitas dan kolaborasi perlu dilanjutkan dengan penciptaan peluang baru melalui semangat co-create. Dengan demikian, pengusaha perempuan di kawasan dapat meningkatkan daya saing dan mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi.

"Nah mungkin di sini yang perlu dikembangkan ialah bagaimana kompetitiveness kawasan kita antar-perempuan ini naik kelas, karena perempuanlah harapan kita semua. Bukan berarti laki-laki tidak mampu tapi perempuan 67% daripada ekonomi jadi memang mayoritas," terang Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IWAPI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara pengusaha perempuan Indonesia dan sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Malaysia, dan Rusia.

Menurut Nita, kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kapabilitas dan skala usaha para pengusaha perempuan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga mampu memperluas jangkauan bisnis ke pasar global.

"Indonesia ini sangat kaya, maka mereka akan berinvestasi di sini dan berkolaborasi bersama-sama untuk bisa meningkatkan kapabilitas kita, meningkatkan usaha kita, agar tidak hanya fokus di domestik, tetapi bisa merambah ke global," ujar Nita.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan keterangan pers usai acara The 4th Asian Women Entrepreneurs Conference & International Women in Business and Investment Summit yang digelar oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersama Asian Women Entrepreneurs Congress di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2026).

QUICK WINS

Pengangguran Sarjana di Jatim Tertinggi, Pemagangan Nasional Jadi Jembatan ke Dunia Kerja



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto saat memberikan sambutan dalam acara Coaching Clinic Pendaftaran Mitra Penyelenggara Pemagangan Nasional yang digelar BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan di Graha Kadin Jatim, Senin (12/10/2026).

Surabaya – Pengangguran di Jawa Timur (Jatim) masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi. Di tengah kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang sesuai kompetensi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan sarjana justru terus meningkat. Program pemagangan nasional pun diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan lulusan baru.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jatim melalui Biro Organisasi Jatim, TPT lulusan sarjana pada Februari 2026 mencapai 6,04 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Februari 2025 sebesar 5,60 persen dan Februari 2024 sebesar 4,07 persen.

Tingkat pengangguran lulusan sarjana itu bahkan menjadi yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Posisi berikutnya ditempati lulusan SMA dengan TPT 5,75 persen dan lulusan SMK sebesar 5,73 persen.

Gambaran serupa juga terlihat pada tingkat nasional. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), porsi lulusan perguruan tinggi dalam total pengangguran Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Agustus 2022, lulusan perguruan tinggi tercatat sekitar 674 ribu orang atau 7,98 persen dari total pengangguran. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 843 ribu orang atau 11,28 persen pada Agustus 2024. Tren itu berlanjut pada Mei 2026. Data Sakernas mencatat sebanyak 1.033.182 penganggur merupakan lulusan perguruan tinggi, mulai diploma IV, sarjana (S-1), magister (S-2), hingga doktor (S-3). Jumlah tersebut setara dengan 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di Indonesia.

Kenaikan tersebut menurut Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, telah mengisyaratkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan, tetapi juga kemampuan pasar kerja menyerap lulusan sesuai kompetensi yang dimiliki. Dan tingginya pengangguran lulusan sarjana menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan keterlibatan dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

"Ini jadi PR kita semua. Pengangguran terbesar sekarang lulusan S1 di Jatim. Angkanya cukup tinggi," ujarnya saat kegiatan coaching clinic pendaftaran mitra penyelenggara pemagangan nasional yang digelar BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan di Graha Kadin Jatim, Senin (12/10/2026).

Menurut Adik, besarnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun menjadi tantangan tersendiri bagi penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dibutuhkan langkah konkret agar para lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga pengalaman dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Adik berharap program pemagangan nasional dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi pengangguran di Jatim. Kadin Provinsi Jatim mengimbau Kadin kabupaten/kota, terutama di kawasan industri seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto agar turut menyosialisasikan program tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini Kadin Provinsi Jatim mendapat kesempatan untuk menjadi tempat sosialisasi pemagangan. Kami berharap program ini bisa membantu menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Timur," katanya.

Menurut dia, pemagangan harus dilaksanakan secara terstruktur selama enam bulan. Perusahaan perlu menyiapkan pendamping atau mentor yang membimbing peserta sejak awal hingga akhir program, sehingga mereka benar-benar memperoleh pengalaman kerja di lingkungan industri.

"Kami berharap setelah magang, teman-teman industri bisa mempekerjakan mereka," ujar Adik.

Ia menambahkan, kebutuhan regenerasi tenaga kerja di industri juga menjadi peluang bagi lulusan baru. Menurut Adik, terdapat industri yang melakukan pergantian atau regenerasi hingga sekitar 300 tenaga kerja dalam setahun. Kondisi tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menerima peserta pemagangan sekaligus menyiapkan calon tenaga kerja baru.

Kepala BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan Muhammad Aiza Akbar mengatakan, program pemagangan nasional dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Program ini terbuka bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus maksimal satu tahun terakhir.

"Magang ini menjadi salah satu terobosan yang paling pas untuk mengisi mismatch antara kebutuhan yang ada di industri dengan kompetensi lulusan," katanya.



Kepala BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Aiza Akbar memberikan paparan dalam acara Coaching Clinic Pendaftaran Mitra Penyelenggara Pemagangan Nasional yang digelar BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan di Graha Kadin Jatim, Senin (12/10/2026).

Pada 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 peserta pemagangan secara nasional, meningkat dibandingkan target 100.000 peserta pada tahun sebelumnya. Program tersebut tidak memiliki kuota khusus per provinsi. Karena itu, perusahaan dan calon peserta perlu memanfaatkan kesempatan yang tersedia sesuai persyaratan program.

Aiza menjelaskan, perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara dapat memperoleh manfaat dari kehadiran peserta pemagangan yang masih memiliki semangat belajar tinggi. Selama program berlangsung, peserta memperoleh uang saku setara upah minimum kabupaten/kota setempat yang dibayarkan melalui APBN, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga wajib menyediakan pendampingan selama masa pemagangan.

Untuk mengikuti program tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), serta mendaftarkan diri melalui platform yang disediakan pemerintah. Melalui kegiatan coaching clinic, perusahaan diharapkan dapat memahami proses pendaftaran dan menyiapkan formasi pemagangan sesuai kebutuhan masing-masing.



Foto bersama usai penyelenggaraan Coaching Clinic Pendaftaran Mitra Penyelenggara Pemagangan Nasional yang digelar BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan di Graha Kadin Jatim, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan, manfaat program ini tidak hanya diukur dari kemungkinan peserta direkrut setelah magang. Pengalaman bekerja selama enam bulan juga dapat menjadi bekal penting bagi lulusan baru, mulai dari memahami pola kerja, membangun kerja sama tim, hingga menyelesaikan persoalan di lingkungan perusahaan.

"Minimal adik-adik kita benar-benar punya pengalaman bagaimana bekerja di perusahaan. Selama ini, hal-hal seperti itu belum tentu didapatkan di bangku kuliah," ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan dapat memetakan kemampuan lulusan baru secara lebih langsung. Hasilnya bisa menjadi masukan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan kebutuhan pelatihan, sementara perguruan tinggi memperoleh gambaran mengenai perubahan kompetensi yang dibutuhkan industri.

Menurut Aiza, meningkatnya pengangguran sarjana tidak serta-merta menunjukkan bahwa kurikulum perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Perubahan dunia usaha yang berlangsung cepat juga menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan programnya.

Dengan demikian, keberhasilan pemagangan nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti program. Kualitas pendampingan, kesesuaian bidang magang, pengalaman kerja yang diperoleh, dan peluang penyerapan setelah program berakhir menjadi faktor penting agar pemagangan benar-benar menjadi jembatan dari bangku kuliah menuju dunia kerja.

KABAR DAERAH

Kadin DIY Hadirkan Simfoni 1.001 Pembatik, Hidupkan Batik di Jantung Malioboro



Peserta Simfoni 1.001 Pembatik 2026 memadati Jalan Malioboro, Yogyakarta dalam rangka Hari Batik Nasional sekaligus menyambut HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang digelar oleh Kadin Provinsi DIY pada Sabtu (3/10/2026).

Yogyakarta - Kawasan legendaris Jalan Malioboro berubah menjadi panggung mahakarya budaya pada Sabtu pagi, 3 Oktober 2026. Ribuan jemari dari berbagai latar belakang tampak khusyuk menari di atas kain putih, meniup canting, dan menggoreskan malam panas.

Diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi DIY, gelaran bertajuk "Simfoni 1.001 Pembatik 2026" ini sukses menggetarkan jantung Kota Gudeg dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut HUT ke-270 Kota Yogyakarta.

Mewakili Ketua Umum Kadin Provinsi DIY, Gunarta Adibrata menegaskan bahwa agenda besar ini merupakan program strategis tahun 2026 yang berfokus pada bidang pemberdayaan perempuan. Bagi DIY, batik bukan sekadar warisan adiluhung lintas generasi yang sarat filosofi identitas, melainkan juga roda penggerak ekonomi masyarakat.

"Melestarikan batik adalah ikhtiar bersama menjaga jati diri sekaligus membangun masa depan," ujar Gunarta dalam sambutannya.

Kemeriahan acara ini diakui langsung oleh Ketua Organizing Committee, Indah Rahayu Murniati, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Provinsi DIY.

Indah mengungkapkan rasa bangganya melihat antusiasme peserta yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari pencinta batik, pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga wisatawan mancanegara.

"Mencanting itu indah sekali. Melalui Malioboro yang ikonik, kita ingin mengajak semua lapisan masyarakat dan pelaku UMKM untuk membatik bersama," kata Indah.

Sementara itu, Jan Tielcke, seorang wisatawan berkewarganegaraan Jerman yang berdomisili di Seligenstadt, salah satu kota tertua di Distrik Offenbach, Jerman, menceritakan pengalamannya tiga tahun lalu saat memperkenalkan batik ke warga lokal dan anak muda di sana. Melalui lokakarya intensif, para pemuda Jerman tidak hanya terpukau oleh nilai seni batik canting asli, tetapi juga mulai menghargai proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu lama.

Semangat pelestarian ini juga disambut hangat oleh generasi muda lokal. Zona Ayuningdyah Arifin, salah satu peserta muda, mengaku bahwa acara seperti ini membuka matanya untuk mengenal batik secara detail hingga menumbuhkan rasa cinta pada karya leluhur. Siswi kelas 2 SMA Muhammadiyah Kasihan Bantul yang membatik motif Nitisekar ini berharap acara edukatif seperti ini rutin digelar setiap tahun. Menurutnya, membatik tidak hanya menyelamatkan budaya dari kepunahan, tetapi juga menjadi aktivitas positif yang efektif mengalihkan remaja dari kecanduan gawai.

Pemeriahan pesta budaya yang berlangsung dari pukul 06.00 hingga 14.30 WIB ini dikemas secara apik melalui berbagai rangkaian acara menarik, antara lain:

- Aksi Pembuka: Pelepasan sepeda batik, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan Ketua Panitia Simfoni 1.001 Pembatik 2026.
- Seremonial Utama: Sambutan dari Ketua KADIN, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, serta Gubernur DIY yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan. Acara resmi dibuka secara simbolis lewat pemukulan kentongan yang menandai dimulainya sesi membatik bersama.
- Panggung Hiburan & Edukasi: Semarak penampilan line dance, pertunjukan musik angklung yang syahdu, talkshowinteraktif bersama Balai Batik, pementasan tarian tradisional, hingga aksi panggung dari Band Mazdar.
- Penutup: Penyerahan hasil karya membatik secara simbolis, sesi foto bersama, dan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat.

Melalui Simfoni 1.001 Pembatik ini, Yogyakarta kembali membuktikan posisinya sebagai Kota Batik Dunia yang mampu mengawinkan tradisi lama dengan napas modernisasi, sekaligus memastikan warisan UNESCO yang ditetapkan di Abu Dhabi silam tetap hidup dan lestari di tangan generasi muda.

Kadin dan KDEKS Lampung Susun Peta Jalan Green Banking untuk Perbankan Syariah

Bandar Lampung – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Disemisasi dan Advokasi Kebijakan dengan tema "Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah, Inklusi Gender dan Pengarusutamaan ESG Berbasis Maqasid Al Syariah di Provinsi Lampung" yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kadin Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Senin (26/10/2026).

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi dan Hukum Kadin Provinsi Lampung Romi Junanto Utama mengatakan, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu langkah yang ingin didorong dunia usaha untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Lampung.

Menurut Romi, pengembangan sektor tersebut tidak cukup hanya mengandalkan inisiatif perbankan maupun pelaku usaha.

Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan yang terarah juga diperlukan agar perbankan syariah mampu berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional.

"Kami sebagai perwakilan dunia usaha sangat ingin agar Provinsi Lampung memiliki Perda tentang Keuangan dan Ekonomi Syariah," kata Romi.

Romi menilai, regulasi daerah dapat memperkuat berbagai program yang telah berjalan sekaligus mendorong percepatan inklusi keuangan syariah. Kadin, kata Romi, berharap gagasan tersebut mendapat perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Romi menyebut, hasil FGD akan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi melalui tim khusus sebelum disampaikan kepada gubernur. "Diskusi ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi masukan kebijakan," kata Romi.



Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Lampung yang juga merupakan Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung Ardiansyah (kiri) memberikan pemaparan dalam Focus Group Discussion (FGD) Disemisasi dan Advokasi Kebijakan dengan tema "Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah, Inklusi Gender dan Pengarusutamaan ESG Berbasis Maqasid Al Syariah di Provinsi Lampung" yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kadin Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Senin (26/10/2026).



Sementara itu, Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Lampung yang juga merupakan Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung Ardiansyah, menilai intervensi pemerintah melalui regulasi diperlukan untuk memperkuat posisi perbankan syariah. Dia menyoroti pangsa pasar dan aset perbankan syariah yang, menurut paparannya, masih berada pada kisaran 6–8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan sektor keuangan syariah di tengah dominasi perbankan konvensional.

"Ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme business to business saja," ujarnya. Ardiansyah menjelaskan, pengembangan ekonomi syariah di daerah perlu ditopang regulasi, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan peran pelaku usaha dan industri perbankan. Menurut dia, pemahaman masyarakat mengenai bank syariah juga masih perlu diperbaiki. Sebagian masyarakat telah mengenal keberadaan bank syariah, tetapi belum sepenuhnya memahami prinsip, akad, dan perbedaan mendasar dalam praktiknya dibandingkan perbankan konvensional. Karena itu, upaya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah tidak cukup hanya melalui penambahan produk dan layanan. Edukasi yang menjelaskan substansi prinsip syariah dinilai penting agar masyarakat memahami pilihan layanan keuangan yang tersedia.

Ardiansyah juga memaparkan tiga indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, yakni sertifikasi halal, pengelolaan zakat dan dana sosial, serta nilai aset perbankan syariah.

"Ketiga indikator tersebut, perlu menjadi bagian dari upaya penguatan ekosistem ekonomi syariah di Lampung," katanya.

Lebih lanjut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Muslimin, memaparkan penelitian mengenai keberagaman gender, struktur blockholder, dan kinerja ESG perbankan syariah global. Salah satu temuan penelitian menunjukkan, keberadaan perempuan dalam manajemen eksekutif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ESG perbankan syariah, dengan koefisien beta sebesar 0,214 dan tingkat signifikansi statistik p kurang dari 0,01.

Sementara itu, keberagaman gender dalam jajaran dewan juga menunjukkan pengaruh positif, tetapi lebih lemah, dengan koefisien beta sebesar 0,065 dan tingkat signifikansi p kurang dari 0,10. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan pada posisi eksekutif berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dibandingkan keberagaman gender pada jajaran dewan dalam model penelitian tersebut.

Peran eksekutif dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan operasional, penerapan kerangka ESG, dan pelaksanaan strategi keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks perbankan syariah, penguatan ESG juga perlu ditempatkan dalam kerangka maqasid al-syariah, yakni tujuan-tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan.

"Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola sekaligus memastikan kegiatan usaha memberikan manfaat yang lebih luas," ujarnya.

Kadin Jatim Dorong Impor Tembakau Virginia dari Pakistan Disertai Transfer Teknologi

Surabaya – Peluang impor tembakau Virginia dari Pakistan ke Jawa Timur (Jatim) terbuka seiring tingginya kebutuhan industri hasil tembakau (IHT) di daerah tersebut. Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jatim berharap kerja sama perdagangan itu tidak sebatas mendatangkan bahan baku, tetapi juga disertai transfer teknologi, pengembangan bibit, dan kerja sama budidaya agar memberikan nilai tambah bagi industri tembakau di dalam negeri.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, Jatim merupakan salah satu sentra utama tembakau nasional sekaligus provinsi dengan jumlah industri hasil tembakau terbanyak di Indonesia. Di sisi lain, kebutuhan tembakau Virginia untuk industri rokok di Jatim masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

"Boleh-boleh saja mereka masuk ke sini. Namun, kami berharap ada tukar teknologi. Jadi, tidak hanya membawa tembakau dari negara tertentu, tetapi juga ada kerja sama budidaya, pengembangan bibit, dan teknologinya," ujar Adik saat kunjungan industri Pakistan ke Graha Kadin Provinsi Jatim, Rabu (20/10/2026).

Menurut Adik, tembakau Virginia menjadi salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan negara-negara pemasok. Selain Pakistan, sejumlah negara yang selama ini menjadi sumber pasokan tembakau Virginia untuk Indonesia antara lain Brasil dan Zimbabwe.



Foto bersama jajaran pengurus Kadin Provinsi Jawa Timur dengan jajaran delegasi bisnis Pakistan di Graha Kadin Provinsi Jatim, Rabu (20/10/2026).

Negara-negara tersebut memiliki potensi pasokan karena produksi tembakau Virginia di negara asal relatif melimpah. Sementara itu, industri hasil tembakau di Jatim membutuhkan pasokan Virginia dalam jumlah besar, tetapi produksi lokalnya masih terbatas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi tembakau Jatim pada 2025 mencapai 148,77 ribu ton dengan luas panen 125,54 ribu hektare. Jumlah tersebut menyumbang 46,22 persen dari total produksi tembakau nasional yang mencapai 321,90 ribu ton.

Provinsi Jatim juga memiliki beragam varietas tembakau yang dikembangkan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan industri. Di antaranya Besuki Na Oogst dari wilayah Jember dan Bondowoso yang banyak dimanfaatkan untuk cerutu ekspor,

Kasturi dan Virginia yang dibudidayakan di sejumlah wilayah termasuk Madura dan Situbondo, serta White Burley dari Lumajang untuk kebutuhan rokok putih mesin.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian hingga akhir 2024, jumlah industri hasil tembakau di Jatim mencapai 1.352 unit. Besarnya basis industri tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pasar Jatim menarik bagi pemasok tembakau dari luar negeri.

Adik menilai, peluang perdagangan tembakau impor seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan produksi di dalam negeri. Salah satu tantangannya adalah mengembangkan varietas Virginia yang sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia sehingga ketergantungan terhadap pasokan impor dapat dikurangi.



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto (kanan) bersama Chief Executive Officer Nsyniyaz Tobacco Company, Shaheer Kham (kiri) di di Graha Kadin Provinsi Jatim, Rabu (20/10/2026)

"Ini bisa menjadi bahan kajian bagi kampus yang memiliki basis pertanian, balai penelitian, maupun lembaga riset lainnya. Bagaimana menghasilkan tembakau Virginia yang benar-benar bisa dibudidayakan di Indonesia," kata Adik.

Adik menambahkan, Kadin Provinsi Jatim juga tengah menjajaki kerja sama dengan salah satu negara yang belum dapat disebutkan namanya. Penjajakan tersebut mencakup pengembangan budidaya, penyediaan bibit, dan transfer teknologi, termasuk peluang pembangunan pabrik di Jatim.

Menurut Adik, pola kerja sama semacam itu akan memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan perdagangan bahan baku semata. Selain membuka peluang investasi, kerja sama tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan petani dan pelaku industri lokal dalam mengembangkan tembakau Virginia.

Sementara itu, Chief Executive Officer Nsyniyaz Tobacco Company, Shaheer Kham, mengatakan perusahaannya telah menjalin komunikasi bisnis dengan Indonesia selama sekitar dua tahun. Kunjungan terbarunya ke Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan dengan calon pembeli dan menjajaki peluang perdagangan tembakau Pakistan.

"Kami sangat senang dengan upaya yang telah dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pembeli di sini. Kami menantikan peluang bisnis dengan pasar Indonesia, khususnya pembeli di industri tembakau," ujarnya.

Shaheer menilai Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan seiring berkembangnya industri tembakau. Perusahaannya ingin memperkenalkan produk tembakau Pakistan kepada pembeli Indonesia sekaligus membangun hubungan bisnis jangka panjang.

Ia mengakui tembakau Pakistan masih perlu memperluas pengenalan pasar di Indonesia. Menurutnya, harga menjadi salah satu tantangan dalam persaingan dengan produk dari negara lain, termasuk India dan Bangladesh. Meski demikian, ia mengeklaim tembakau Pakistan memiliki kualitas yang lebih baik.

Shaheer menyebut perbedaan harga atau nilai produk tembakau Pakistan dengan produk Bangladesh dapat mencapai sekitar 25–30%, meskipun perbandingan tersebut masih perlu dilihat berdasarkan jenis, kualitas, dan spesifikasi produk yang diperdagangkan.

"Kami ingin membangun hubungan dengan pembeli Indonesia. Masyarakat di sini sangat ramah dan menyambut kami dengan baik. Kami berharap dapat mengembangkan bisnis bersama mereka," katanya.

Bagi Kadin Provinsi Jatim, masuknya pemasok tembakau dari Pakistan maupun negara lain dapat menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Namun, kerja sama tersebut diharapkan berkembang menjadi kemitraan yang lebih strategis melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan pengembangan budidaya di dalam negeri.

KADIN INDONESIA

KADIN INDONESIA MAPAN

RAPIMNAS
KADIN 2026

Ekonomi Kerakyatan Untuk Indonesia Mendunia:
UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas

29 - 30 OKTOBER 2026 | HOTEL BOROBUDUR JAKARTA

Rapimnas Kadin 2026 **Official Sponsors**

Official Main Partner : sinarmas agribusiness and food, LIPPO GROUP, BAKRIE CENTER FOUNDATION, SCBD, BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

Official Supporting Partner : ASTRA, TRIPUTRA AGRO PERSADA

Partnership with : Wira Raja Mandiri, PT Freeport Indonesia, APRIL, Anindya, Mastersystem, BRI, mandiri, SYAM, BOSOWA, Bluebird Group, ASAKI, BNI, PLN Icon Plus, btn, BSI, Chandra Asri, frits novanto sunandar, AdaKami, SSP

KADIN INDONESIA

KADIN INDONESIA MAPAN

ROAD TO
RAPIMNAS
KADIN 2026

GEOECONOMICS POLICY DIALOGUE

Public-private Partnerships In Escaping The Middle Income Trap Amidst Geopolitical Shifts

Monday, 26 October 2026 - 7.30 AM | Marriott Hotel Gelora, Jakarta



Michaela Felber
Director of International Development at INSEAD



Prof. Bambang Brodjonegoro
Dean and CEO, Asian Development Bank Institute (ADBI)



Anindya Novyan Bakrie
Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin Indonesia)



Prof. Francisco Veloso
Dean of INSEAD



Bernardino M. Vega
Vice Chairman for Foreign Relations of Kadin Indonesia

Official Main Partner : sinarmas agribusiness and food | LIPPO GROUP | BCF BAKRIE CENTER FOUNDATION

Official Supporting Partner : ASTRA | TRIPUTRA AGRO PERSADA

Partnership with : PT Freeport Indonesia | APRIL | ANINDYA | WIR RAJA MADURA | Mastersystem | BRI | mandiri | Bluebird Group | ASAKI | BNI | PLN Icon Plus | BSI | Chandra Asri | btn | AdaKami

Official Venue Partner : Marriott Jakarta Gelora | SSP

KADIN INDONESIA

KADIN INDONESIA MAPAN

ROAD TO RAPIMNAS KADIN 2026

KADIN INDONESIA INSTITUTE

Toulouse School of Economics

EXECUTIVE CERTIFICATE

Economic Complexity & Innovation Policy

Komplesitas Ekonomi sebagai Rapor dan Kompas Hilirisasi & Industrialisasi Indonesia



Erwin Aksa
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia

Anindya Novyan Bakrie
Ketua Umum Kadin Indonesia

Prof. Cesar A. Hidalgo
Professor of Social and Behavioral Sciences
Toulouse School of Economics
Director, Center for Collective Learning

26 - 28 October 2026
Hotel Borobudur Jakarta

Certified By : Toulouse School of Economics

Limited to :
40 Participans

REGISTER NOW https://event.kadin.id/IndonesiaEconomicComplexity/Forum

KADIN INDONESIA | KADIN INDONESIA MAPAN | ROAD TO RAPIMNAS KADIN 2026 | KADIN INDONESIA INSTITUTE | Toulouse School of Economics

EXECUTIVE CERTIFICATE

Economic Complexity & Innovation Policy

Rapimnas Kadin 2026 Official Sponsors

Official Main Partner :

sinarmas agribusiness and food

LIPPO GROUP

BCF | BAKRIE CENTER FOUNDATION

Official Supporting Partner :

ASTRA

TRIPUTRA AGRO PERSADA

Partnership with :

WIR RAJA MADURA | PT FREEPORT INDONESIA | APRIL | TEMPO SCAN | ANINDYA | INDOCEMENT | Mastersystem

BRI | mandiri | BOSOWA | Bluebird Group | ASAKI | BNI | PLN Icon Plus | frits novianto surendar

BSI | Chandra Asri | btn | AdaKami | TIGALAPAN INVESTAMA GROUP | SSP

KADIN INDONESIA

KADIN INDONESIA MAPAN

Presented by :

KADIN INDONESIA GOLF CLUB

Road To **Rapimnas Kadin 2026**





Sunday 25th October 2026 | 07.00 AM

Sedayu Indo Golf PIK 2 - Jakarta Indonesia

Rapimnas Kadin 2026 - Official Sponsors

Official Main Partner :

sinarmas agribusiness and food

LIPPO GROUP

BAKRIE CENTER FOUNDATION

Official Supporting Partner :

ASTRA

TRIPUTRA AGRO PERSADA

Partnership with :

PT Freeport Indonesia

APRIL

ANINDYA

Mastersystem

BRI

mandiri

BOSOWA

Bluebird Group

ASAKI

BNI

PLN Icon Plus

BSI

Chandra Asri

btn

AdaKami

SSP

B7 - Nature Based & Rio Sinergy

Forest-Based Bioeconomy for Climate, Nature and Communities: Advancing Indonesia's Nature-Based Economy through Multi-Use Forest Landscapes

SPEAKERS



Laksmi Wijayanti
Director General of Sustainable Forest Management Ministry of Forestry, Republic of Indonesia



Shinta Widjaja Kamdani
Coordinating Vice Chairman for Human Development, Culture, and Sustainable Development, KADIN Indonesia



Elim Sritaba
Vice Chairman for Sustainable Business and Governance, KADIN Regenerative Forest Business Hub (RFBH), KADIN Indonesia



Maggie Charnley
Head of the UK government's International Forests Unit within the UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), United Kingdom



dr. Sari Chairunnisa
Deputy CEO and Chief R&D Officer, ParagonCorp



Emmy Primadona
Project Leader Community Carbon, KKI Warsi as Responder

MODERATOR



Widharmika Agung
Regional Director, Southeast Asia, Partnerships for Forests (P4F)

THURSDAY 12TH NOV 2026

INDONESIA PAVILION
No. Pav B135 I BLUE ZONE

17.15 - 18.45
ANTALYA TIME (UTC+3)

LIVE STREAM

indonesiaunfccc.com
kemenlh.go.id
kadinregforest.com

@indonesiapavilion.cop
@kemenlh_bplh
@kadin.rfb

cop unfccc - indonesia pavilion

KADIN INDONESIA

BPKN-RI

#KonsumenBerdaya

ICC 100 EXPO AWARD

INDONESIA CONSUMER CARE 100 BRANDS

ICC 100 Brands & Indonesia Consumer Protection Award

MEMBANGUN KEPERCAYAAN KONSUMEN BERDAYA

ICC 100 Brands dan Indonesia Consumer Award 2026, menjadi sebuah ajang apresiasi antara KADIN dan BPKN-RI yang dinantikan bagi para brand dan tokoh terpilih yang berkomitmen lebih terhadap kualitas, kepercayaan, dan perlindungan konsumen Indonesia.

Sabtu,
21 November 2026

Jakarta International Expo - Hall D2



Nurdin Halid
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar

Muhammad Mufti Mubarok
Ketua BPKN RI

Anindya Novyan Bakrie
Ketua Umum Kadin Indonesia

KADIN INDONESIA



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!

KADIN INDONESIA

ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.





KADIN INDONESIA

APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:

- Australia
- Brunei Darussalam
- Cile
- China
- Filipina
- Hong Kong
- Indonesia
- Jepang
- Korea Selatan
- Malaysia
- Meksiko
- Papua Nugini
- Peru
- Rusia
- Selandia Baru
- Singapura
- Tailan
- Taiwan
- Vietnam



KADIN INDONESIA

Keuntungan Memiliki ABTC:

- Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada
- Bisa menetap 90 hari per kunjungan
- Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara



KADIN INDONESIA

Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
2. Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
3. Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
4. Scan NIB perusahaan
5. Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional



sekretariat@kadinindonesia.id
cc: selly.kadin@gmail.com

https://trade.layanankadin.id/abtc

KADIN INDONESIA

Layanan *Dokumen Ekspor*

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis SKA/COO

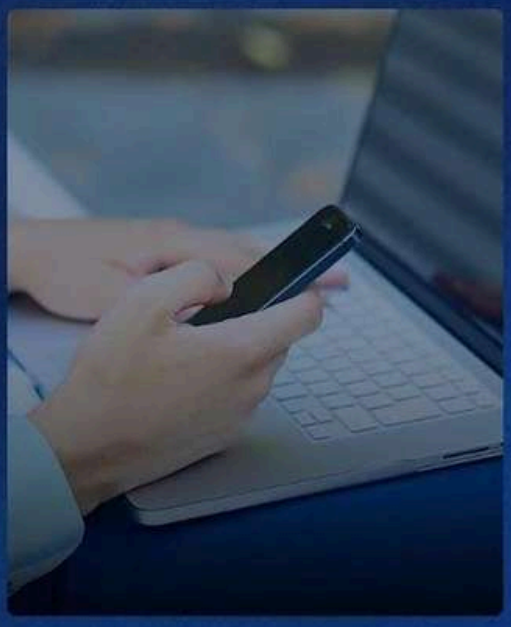
SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:



1. Buka *https://trade.layanankadin.id/*
2. Log in atau Mendaftar Akun
3. Melengkapi Data-data perusahaan
4. Melakukan Pembayaran
5. Dokumen siap dicetak dan digunakaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

KADIN INDONESIA

Jenis Formulir COO

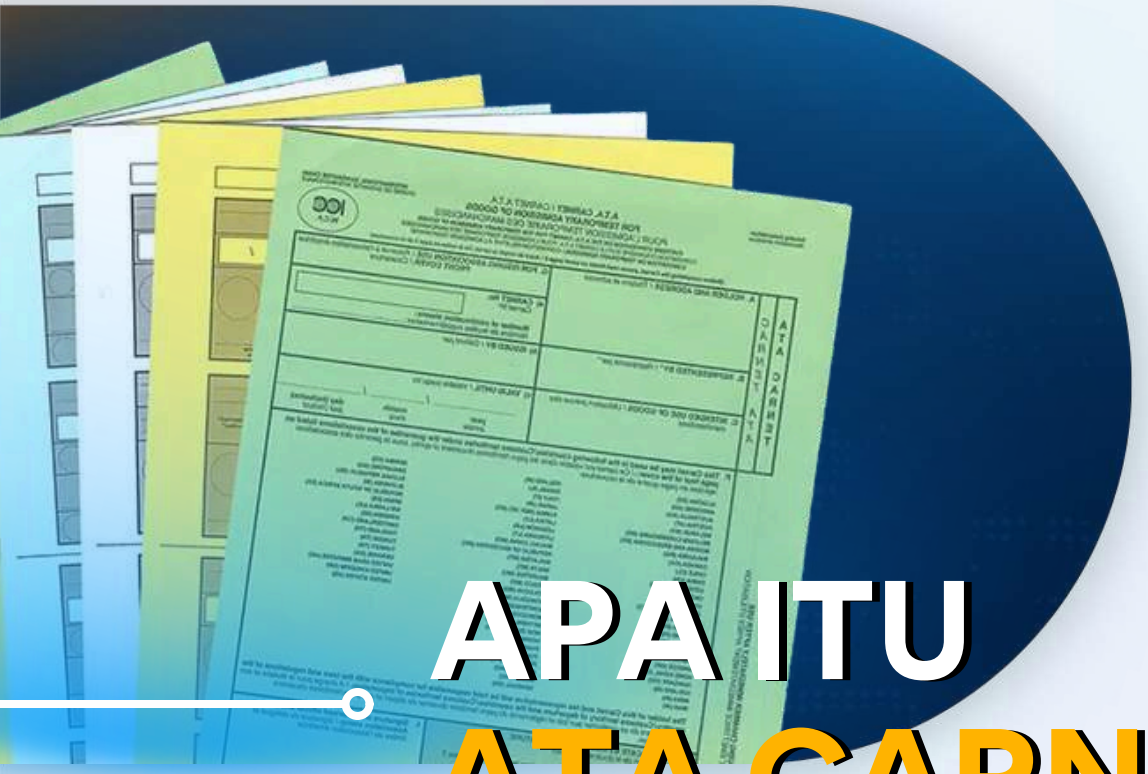
Form China	Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Prefential Tarif Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.
Form B	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.
Form B with Notification	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.
Form ASEAN-India	Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form A	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.
Form D	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form Textile Product	Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia
Form Certificate of Export Goods	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.
Form Certificate of Free Sale	Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

KADIN INDONESIA



GUNAKAN ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR SEMENTARA



APA ITU ATA CARNET?

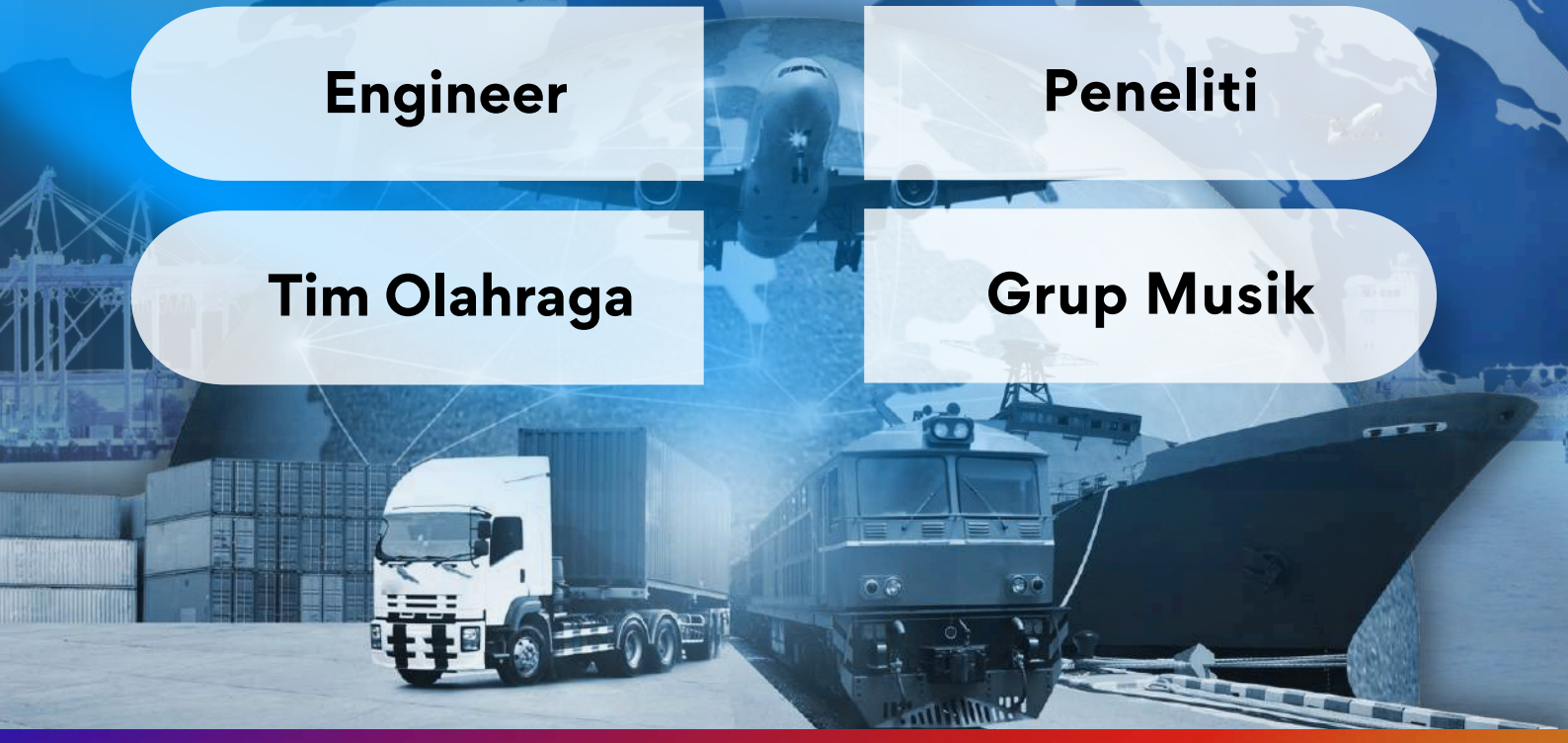
ATA Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.

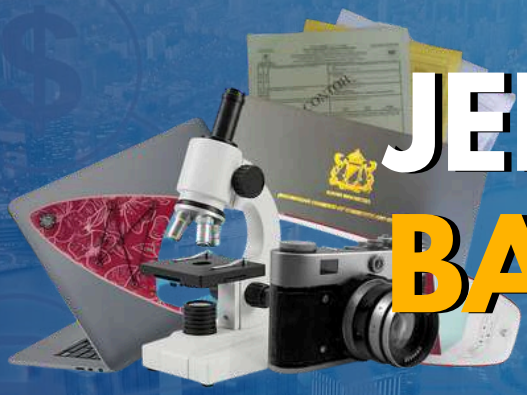
Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai **"Paspor untuk Barang".** Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

PENGGUNA ATA CARNET

- Pebisnis
- Teknisi
- Penyelenggara Pameran
- Profesional, perorangan/tim
- Kru Film
- Dokter/ Ahli Bedah
- Arsitek
- Seniman
- Engineer
- Peneliti
- Tim Olahraga
- Grup Musik





JENIS-JENIS BARANG

Penerapan **ATA Carnet** dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis
2. Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli
3. Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan
4. Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga
5. Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

PERSYARATAN PENERBITAN
ATA CARNET



- Salinan *(copy)* identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili
- Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili
- Salinan *(copy)* Kartu Tanda Keanggotaan Kadin
- Salinan (copy) NPWP Perusahaan/Perorangan
- Salinan *(copy)* SIUP, TDP, dan Domisili Perusahaan
- Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang
- Rencana Perjalanan Barang
- Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal
- Menandatangani surat pernyataan bermaterai
- Meletakkan Jaminan

NEGARA-NEGARA YANG MENERBITKAN DAN MENERIMA ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR DAN IMPOR SEMENTARA:

1. Afrika Selatan
2. Amerika Serikat
3. Albania
4. Algeria
5. Andora
6. Arab Saudi
7. Australia
8. Austria
9. Bahrain
10. Belanda
11. Belarus
12. Belgia
13. Bosnia Herzegovina
14. Bulgaria
15. Chili
16. China
17. Kroasia
18. Siprus
19. Denmark
20. Estonia
21. Finlandia
22. Filipina
23. Gibraltar
24. Hong Kong
25. Hungaria
26. India
27. Indonesia
28. Inggris
29. Iran
30. Irlandia
31. Islandia
32. Israel
33. Italia
34. Jepang
35. Jerman
36. Kanada
37. Kazakstan
38. Korea Selatan
39. Latvia
40. Libanon
41. Lithuania
42. Luksemburg
43. Makau
44. Madagaskar
45. Malaysia
46. Malta
47. Maroko
48. Mauritius
49. Makedonia Utara
50. Meksiko
51. Moldova
52. Mongolia
53. Montenegro
54. Norwegia
55. Pakistan
56. Pantai Gading
57. Prancis
58. Peru
59. Polandia
60. Portugal
61. Qatar
62. Republik Ceko
63. Rumania
64. Rusia
65. Selandia Baru
66. Senegal
67. Serbia
68. Singapura
69. Slowakia
70. Slowenia
71. Spanyol
72. Sri Lanka
73. Swedia
74. Swis
75. Tailan
76. Tunisia
77. Turki
78. Ukraina
79. Uni Emirat Arab
80. Vietnam
81. Yunani

Dokumen Ata Carnet dikeluarkan oleh: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kontak:
Menara Kadin Indonesia Lantai 24, 29
JL. HR Rasuna Said X-5 Kav.2-3
Kuningan, Jakarta

Telp. (021) 5274484

atacarnet.idn@kadin.id
atau
atacarnetindonnesia@gmail.com

Cantumkan subject email:

- **Pengajuan ATA Carnet** (jika akan mengajukan ATA Carnet)
- **Info ATA Carnet** (jika ingin mendapatkan informasi mengenai ATA Carnet)

KADIN INDONESIA

Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

Akses Situs Resmi

https://kadin.id/keanggotaan

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1 Daftar Akun
Buka **anggota.kadinindonesia.id**

2 Verifikasi Akun
Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

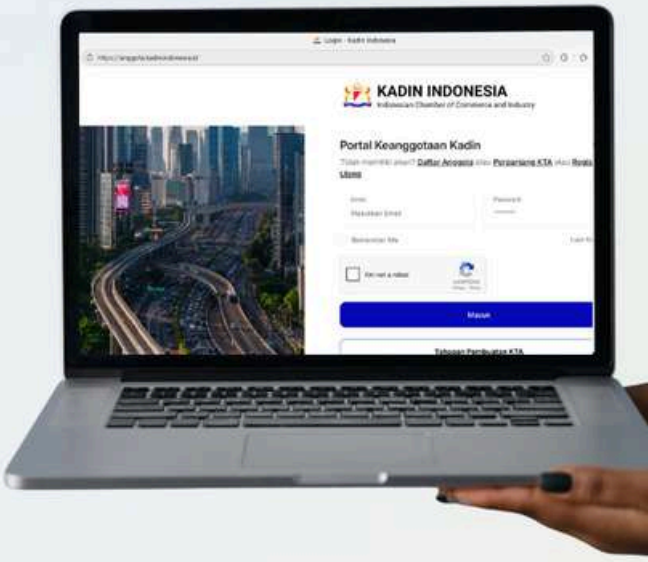
3 Isi Data Perusahaan/ Asosiasi
Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

4 Verifikasi oleh Admin
Admin Kadin akan memverifikasi data anda

5 Pembayaran
Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

6 Validasi Pembayaran
Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

7 Menjadi Anggota Resmi
Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda



KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?

KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda

Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**

Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin **memenuhi kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**

KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**

KTA dan SBU dari Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta

Manfaat Keanggotaan Kadin

- Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi
- Akses terhadap pasar
- Dukungan advokasi
- Akses terhadap transformasi digital
- Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja
- Dukungan dalam penerapan TKDN
- Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis
- Pendampingan menuju Net Zero
- Kesempatan promosi
- Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis
- Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial
- Potongan harga produk/jasa

Saatnya **Level Up**
dan **Maksimalkan** Potensi Bisnismu



Daftar segera menjadi anggota Kadin

anggota@kadinindonesia.id

(+62) 85695410875

kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin
Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen
Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Luthfiah Ramadhani S, Hariwicahyo Utomo, Fery Hasibuan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id

Kadin.Indonesia.Official | kadin_indonesia | kadinindonesiaofficial | kadinindonesia | Kamar Dagang dan Industri Indonesia | kadin.id